

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Aktivitas kehumasan di pemerintah semakin hari semakin berkembang. Hal itu dibuktikan dengan adanya tugas pokok dan fungsi yang dimiliki humas Pemda DIY dan Pemkab Sleman. Berdasar pada tujuan awal penelitian ini untuk mengidentifikasi peran humas di organisasi pemerintah serta asumsi awal penulis, maka paparan di bawah ini merupakan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis di Pemda DIY dan Pemkab Sleman. Terdapat dua hal penting, yaitu:

1. Pemerintah Daerah Tingkat I dan II sama-sama memiliki tiga peran humas yang sama berdasarkan teori peran humas menurut Glenn M. Broom. Peran humas yang dimiliki tersebut antara lain:
 - a. Fasilitator Komunikasi
 - b. Fasilitator Pemecah Masalah
 - c. Teknisi Komunikasi

Sehingga hal tersebut dapat menjawab asumsi awal yang mengatakan bahwa terdapat perbedaan peran yang dimiliki Pemerintah Daerah Tingkat I dan II, namun setelah dilakukan penelitian ditemukan bahwa ternyata tidak terdapat perbedaan peran humas di Pemerintah Daerah Tingkat I dan II dikarenakan adanya konsep sentralisasi di organisasi pemerintah, sehingga secara garis besar acuan konsep regulasi

pembagian tugas pokok dan fungsi kehumasan di tiap organisasi pemerintah sama.

2. Kekhasan otonomi daerah ditunjukkan dengan adanya:
 - a. Perbedaan pembagian Subbagian di Pemerintah Daerah Tingkat I dan II.
 - b. Pelaku peran dan aktivitas humas di Pemerintah Daerah Tingkat I dan II.
3. Peran Teknisi Komunikasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sleman sebagai wakil dari Pemerintah Daerah Tingkat II ternyata lebih besar dibandingkan dengan Pemerintah Daerah DIY yang notabene lingkup wilayah, publik dan kewenangannya lebih luas. Hal ini ditunjukkan pada kegiatan atau aktivitas di lapangan, seperti contohnya Pemkab Sleman lebih sering melaksanakan kegiatan *press tour* dibandingkan dengan Pemda DIY. Lalu juga acara-acara pertemuan.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini, penulis ingin mengemukakan saran yaitu, penelitian ini merupakan proses awal untuk belajar bagaimana perkembangan atau keadaan terkini humas di organisasi pemerintahan. Kedepannya penulis menyarankan agar ada penelitian lanjutan terkait dengan implementasi aktivitas humas pemerintah, karena sekarang ini aktivitas humas pemerintah sudah jauh lebih berkembang, apalagi sejak adanya kebijakan revitalisasi humas mulai tahun 2007. Hal ini akan menjadi topik yang menarik dan baru,

karena sudah banyak sekali penelitian kehumasan yang mengangkat topik mengenai humas di organisasi swasta.

Terkait dengan temuan data yang menunjukkan bahwa hubungan media di Pemkab Sleman ternyata lebih banyak daripada di Pemda DIY, dirasa akan lebih baik jika Pemda DIY juga menambah aktivitas hubungan media dengan mitra wartawan walaupun saat ini hubungannya sudah tergolong baik. Supaya selalu terjalin hubungan yang lebih baik dan tercipta loyalitas mitra wartawan kepada Pemda DIY.

DAFTAR PUSTAKA

Dari buku:

- Alwi, Hasan. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Black, Sam & Melvin L. Sharpen. 1988. *Ilmu Hubungan Masyarakat Praktis*. PT Intermedia. Jakarta.
- Butterick, Keith. 2012. *Pengantar Public Relations Teori dan Praktik*. PT Raja Grafindo. Jakarta.
- Cutlip, Scott M, Allen H. Center & Glenn M. Broom. 2006. *Effective Public Relations Edisi Kesembilan*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Grunig, James E. 1992. *Excellence in Public Relations and Communication Management*. Lawrence Erlbaum Associates. United States of America.
- Iskandar. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Gaung Persada Press. Jakarta.
- Jeffkins, Frank. 1995. *Public Relations*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Kriyantono, Rachmat. 2008. *Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*. Kencana. Jakarta.
- Lattimore, Dan. 2010. *Public Relations: Profesi dan Praktik*. Penerbit Salemba Humanika. Jakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. CV Andi Offset. Yogyakarta.
- Morrison. 2006. *Pengantar Public Relations: Strategi Menjadi Humas Profesional*. Tim Radina Prakasa. Jakarta.
- Moleong, Lexy. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.

Mulyana, Dedi. 2008. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.

Nazir, Moh. 2011. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Bogor.

Rahkmat, Jalaludin. 1991. *Metode Penelitian Komunikasi*. Rosdakarya. Bandung.

Reksohadiprojjo, Sukanto & T. Hani Handoko. 1986. *Teori dan Perilaku Organisasi Perusahaan*. BPFE. Yogyakarta.

Salusu, J. 2005. *Pengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*. Grasindo. Jakarta.

Dari Referensi:

Undang-undang No. 32 Tahun 2004.

Surat Kesepakatan Bersama (SKB) Tiga Menteri – Menteri Dalam Negeri, Menteri Komunikasi dan Informasi, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2007

Peraturan Menteri No. 30 Tahun 2011.

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DIY No. 5 Tahun 2008.

Peraturan Gubernur No. 37 Tahun 2008.

Peraturan Bupati Sleman Nomor. 40 Tahun 2009.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sleman No. 12 Tahun 2011.

Dari Internet:

Antara News. *Sleman Raih Penghargaan Media Humas Nasional*.
<http://jogja.antarane.ws.com/print/305607/sleman-raih-penghargaan-media-humas-nasional> diakses pada tanggal 25 Maret 2013 pukul 12.38 WIB.

Humas Pemkab Sleman. *Tupoksi*. <http://humas.slemankab.go.id/tupoksi/> diakses pada tanggal 26 Maret 2013 pukul 13.21 WIB.

Humas Pemda DIY. *Wartawan Unit Kepatihan Pers Tour ke Malang*. http://facebook.com/permalink.php?story_fbid=473112996097201&id=201233263285177 diakses pada tanggal 27 Juli 2013 pukul 14.13 WIB.

Dari Skripsi:

Lasweny, Rory. 2012. *Identifikasi Kualifikasi Profesi Public Relations Perhotelan di Yogyakarta*. FISIP Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Yogyakarta.

Prasetyoningrum, Christina Hari. 2012. *Identifikasi Model Public Relations dalam Aktivitas Community Relations*. FISIP Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Yogyakarta.



LAMPIRAN



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/6523/V/8/2013

Membaca Surat : Ka.Prodi Ilmu Komunikasi FISIP UAJY Nomor : 25/IX
Tanggal : 26 Agustus 2013 Perihal : Ijin Penelitian

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : CHRISTIN ROSAMARINA NIP/NIM : 090903805
Alamat : JL BABARSARI NO.6, YOGYAKARTA 55281
Judul : IDENTIFIKASI PERAN HUMAS DI ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I DAN II
(STUDI KASUS DI HUMAS PEMERINTAHAN PEMDA DIY DAN PEMKAB SLEMAN)
Lokasi : Biro Umum, Humas dan Protokol Setda Provinsi DIY Provinsi Yogyakarta
Waktu : 28 Agustus 2013 s/d 28 November 2013

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta

Pada tanggal 28 Agustus 2013

A.n Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Hendar Susilowati, SH

NIP. 19580120 198503 2 003

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Kepala Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY
3. Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univ. ATMA JAYA Yogyakarta
4. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Parasamya Nomor 1 Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 868800, Faksimilie (0274) 868800
Website: slemankab.go.id, E-mail : bappeda@slemankab.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Bappeda / 2891 / 2013

**TENTANG
PENELITIAN**

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dasar : Keputusan Bupati Sleman Nomor : 55/Kep.KDH/A/2003 tentang Izin Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan, dan Penelitian.
Menunjuk : Surat dari Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/Reg/V/6668/9/2013 Tanggal : 04 September 2013
Hal : Izin Penelitian

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : CHRISTIN ROSAMARINA
No.Mhs/NIM/NIP/NIK : 090903805
Program/Tingkat : S1
Instansi/Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Alamat instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Babarsari No. 6 Yogyakarta
Alamat Rumah : Nologaten RT 08 RW 03/ 263 CTT, Depok, Sleman
No. Telp / HP : 081391060607
Untuk : Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / PKL dengan judul
**IDENTIFIKASI PERAN HUMAS DI ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH
TINGKAT I DAN II**
Lokasi : Kab. Sleman
Waktu : Selama 3 bulan mulai tanggal: 04 September 2013 s/d 04 Desember 2013

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. *Wajib melapor diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.*
2. *Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.*
3. *Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.*
4. *Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.*
5. *Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.*

Demikian ijin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di Sleman

Pada Tanggal : 9 September 2013

a.n. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sekretaris

u.b.

Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi

Dra. SUCI IRIANI SINURAYA, M.Si, M.M
Pembina, IV/a



Tembusan :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kab. Sleman
3. Kepala Bag. Humas Setda Kab. Sleman
4. Ketua Prodi FISIPOL UAJ Yogyakarta
5. Yang Bersangkutan



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 37 TAHUN 2008

TENTANG
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI SATUAN ORGANISASI
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, disebutkan bahwa uraian tugas masing-masing satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- b. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Gubernur dan Wakil Gubernur Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah;
- c. penyusunan jadwal acara Gubernur dan Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah;
- d. fasilitasi penyiapan bahan kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- e. penyiapan keperluan tugas Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah;
- f. pengaturan penerimaan tamu yang akan menghadap Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah;
- g. penyampaian informasi dari dan atau ke Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah;
- h. penyiapan rapat koordinasi Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah dengan instansi pemerintah maupun swasta;
- i. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Subbagian Tata Usaha Pimpinan.

Pasal 166

Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan hubungan masyarakat.

Pasal 167

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 166, Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Bagian Hubungan Masyarakat;
- b. koordinasi penyelenggaraan kegiatan kehumasan;
- c. penyelenggaraan pendokumentasian kebijakan dan kegiatan Pemerintah Daerah;
- d. penyelenggaraan publikasi kebijakan dan kegiatan Pemerintah Daerah;
- e. penyelenggaraan hubungan antar lembaga;
- f. pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan program Bagian Hubungan Masyarakat.

Pasal 168

Bagian Hubungan Masyarakat terdiri dari :

- a. Subbagian Publikasi, Dokumentasi dan Media Massa;
- b. Subbagian Hubungan Antar Lembaga.

Pasal 169

- (1) Subbagian Publikasi, Dokumentasi dan Media Massa mempunyai tugas melaksanakan publikasi, dokumentasi kebijakan, kegiatan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbagian Publikasi, Dokumentasi dan Media Massa mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbidang Publikasi, Dokumentasi dan Media Massa;
 - b. penyelenggaraan publikasi, dokumentasi kebijakan dan kegiatan pemerintah daerah;
 - c. pelaksanaan publikasi, dokumentasi kegiatan Pemerintah di Daerah;
 - d. penyelenggaraan kemitraan dengan wartawan cetak dan elektronik;
 - e. pelaksanaan produksi paket informasi kebijakan dan kegiatan pemerintah daerah dan kegiatan pemerintah di daerah;
 - f. penyiapan bahan penyusunan kebijakan publikasi di lingkungan pemerintah daerah;
 - g. pemantauan publikasi pemerintah dan non-pemerintah;
 - h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Subbagian Publikasi, Dokumentasi dan Media Massa.

Pasal 170

- (1) Subbagian Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas menyelenggarakan hubungan antar lembaga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbag Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbagian Hubungan Antar Lembaga ;
 - b. pelaksanaan hubungan dan kerja sama dengan organisasi kehumasan pemerintah dan non-Pemerintah;
 - c. penyiapan sambutan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah;
 - d. penyelenggaraan pelayanan informasi Pemerintah Daerah;
 - e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Subbagian Hubungan Antar Lembaga.



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 40 TAHUN 2009

TENTANG

URAIAN TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 65 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-485 Tahun 2009 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman.

Pasal 74

Subbagian Sandi dan Telekomunikasi mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang pelayanan sandi dan telekomunikasi.

Pasal 75

Subbagian Sandi dan Telekomunikasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Sandi dan Telekomunikasi;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis pelayanan sandi dan telekomunikasi;
- c. penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah bidang pelayanan sandi dan telekomunikasi;
- d. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan sandi dan telekomunikasi;
- e. penyelenggaraan pembinaan administrasi dan aparatur bidang pelayanan sandi dan telekomunikasi;
- f. penyelenggaraan pelayanan sandi dan telekomunikasi; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Sandi dan Telekomunikasi.

Pasal 76

Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang dokumentasi, informasi, publikasi, dan protokol.

Pasal 77

Bagian Hubungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bagian Hubungan Masyarakat;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang dokumentasi, informasi, publikasi, dan protokol;
- c. penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang dokumentasi dan informasi;

- d. penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang publikasi;
- e. penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang protokol;
- f. penyelenggaraan publikasi dan keprotokolan pemerintah daerah; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bagian Hubungan Masyarakat.

Pasal 78

Subbagian Dokumentasi dan Informasi mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang pengelolaan dokumentasi dan informasi kegiatan pemerintahan daerah.

Pasal 79

Subbagian Dokumentasi dan Informasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Dokumentasi dan Informasi;
- b. penyiapan perumusan kebijakan pengelolaan dokumentasi dan informasi kegiatan pemerintahan daerah;
- c. penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah bidang pengelolaan dokumentasi dan informasi kegiatan pemerintahan daerah;
- d. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan dokumentasi dan informasi kegiatan pemerintahan daerah;
- e. penyelenggaraan pembinaan administrasi dan aparatur bidang pengelolaan dokumentasi dan informasi kegiatan pemerintahan daerah; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Dokumentasi dan Informasi.

Pasal 80

Subbagian Publikasi mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang penyelenggaraan publikasi pemerintahan daerah.

Pasal 81

Subbagian Publikasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Publikasi;
- b. penyiapan perumusan kebijakan penyelenggaraan publikasi pemerintahan daerah;
- c. penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah bidang penyelenggaraan publikasi pemerintahan daerah;
- d. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan publikasi pemerintahan daerah;
- e. penyelenggaraan pembinaan administrasi dan aparatur bidang penyelenggaraan publikasi pemerintahan daerah;
- f. penyelenggaraan publikasi pemerintahan daerah; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Publikasi.

Pasal 82

Subbagian Protokol mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang penyelenggaraan keprotokolan pemerintahan daerah.

Pasal 83

Subbagian Protokol dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Protokol;
- b. penyiapan perumusan kebijakan penyelenggaraan keprotokolan pemerintahan daerah;
- c. penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah bidang penyelenggaraan keprotokolan pemerintahan daerah;
- d. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan keprotokolan pemerintahan daerah;
- e. penyelenggaraan pembinaan administrasi dan aparatur bidang penyelenggaraan keprotokolan pemerintahan daerah;
- f. penyelenggaraan keprotokolan pemerintahan daerah; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Protokol.

TRANSKRIP WAWANCARA

Wawancara dengan Pak Ali (Kasubbag Hubungan Antar Lembaga Pemerintah DIY) – Selasa, 3 September 2013

1. Menurut Bapak pengertian humas di Pemda DIY?

Kalau di pemerintahan di tingkat DIY ini, yaitu sebagai yang pertama menyebarluaskan informasi tentang kebijakan pembangunan dan pemerintah dan kebijakan pimpinan kepada masyarakat dan kepada *stakeholder*. *Stakeholder* itu swasta, masyarakat ya masyarakat umum itu. Jadi program-program pemerintah itu apa saja disebar lewat itu, nanti medianya lewat media massa, atau langsung lewat bikin majalah atau dialog interaktif di TVRI dan banyak lagi, di radio atau banyak pokoknya, Mbak. Lewat sosialisasi workshop di hotel, sarasehan outdoor, malam hari lewat kesenian-kesenian ketoprak, kayak Opera Van Java, kemarin Senin juga ada kesenian ketoprak juga di Bantul itu contohnya gitu. Terus itu.. Penyebarluasan informasi dari atas ke bawah ya itu. Yang kedua dari bawah ke atas, menampung aspirasi dari masyarakat, apa masyarakat keluhannya di Bantul itu pokoknya ada Pemilu belum jelas atau apa, nah kita bisa membantu lah itu. Terus... Menjembatani arus informasi tentang pembangunan dan pemerintahan, antara pemerintah dan masyarakat. Itu fungsi humas di Pemda DIY. Ya itu aja, gak ada yang lain.

2. Kalau humas di Pemda DIY, latar belakang pendidikannya apa ya Pak?

Saya jurusan Hukum, Pak Budi tu Komunikasi, Pak Is itu Komunikasi. Kebanyakan orang Komunikasi, tapi saya orang Hukum. Bikin sambutan Gubernur saya porsinya.

3. Kalau struktur organisasinya Pak?

Humas berada di bawah Biro Umum, Humas, dan Protokol Sekretariat Daerah DIY di bawah Pak Sekda, Asisten-asisten salah satunya Assekda Administrasi

TRANSKRIP WAWANCARA

Wawancara dengan Pak Bandang (Kasubbag Publikasi Sleman) – Jumat, 6 September 2013

1. Kalau menurut Bapak, Humas di Sleman itu diartikan seperti apa?

Kalau saya, humas adalah sebagian dari sebuah organisasi di mana dia mempunyai fungsi mengungkap fakta, bercerita tentang apa adanya yang kemudian di situ ada upaya kita untuk. Jadi misalnya Sleman itu punya telur mentah, saya sebagai humasnya Sleman akan bercerita untuk orang bahwa Sleman punya telur. Tetapi kalau memang Sleman punya telur tapi belum matang, masih setengah matang ya saya tidak akan mengekspos tentang telur, tapi akan mengekspos tentang mungkin sayuran yang dipunyai Sleman, tidak akan menyinggung soal telur. Tetapi kalau memang Sleman mempunyai telur dan itu sudah matang, saya akan mengatakan, “Sleman punya telur, tapi kalau Anda ke Sleman ini lho kita bukan hanya beli telur, tapi telurnya ini bisa dimakan menggunakan tambahan mau bumbu kacang atau bumbu kecap, nah kita sediakan semua”. Nah, istilahnya begitu.

2. Kalau struktur organisasi khususnya humas di Sleman ini bagaimana Pak?

Kalau di Sleman ini ada tiga Subbag, saya Publikasi, teman saya Pak Helmi dokumentasi dan informasi, terus Pak Aga itu di Protokol, di Sleman itu begitu. Kami ada tugas masing-masing, kalau di tempat saya Publikasi itu mengerjakan media internal. Media internal itu ada tiga media, Tabloid itu Varia Sembada, Tabloid Akar, kalau Varia Sembada itu tabloid yang kontennya itu informasi tentang hal-hal baru atau isu-isu yang berkembang untuk memberi penyegaran atau wacana baru di tatanan birokrasi. Kalau yang Akar itu untuk pertanian, jadi kita kerja sama dengan Dinas Pertanian untuk membuat Tabloid Akar yang kontennya terkait dengan masalah pertanian, inovasi-inovasi pertanian atau pengalaman-pengalaman pelaku usaha tani yang berhasil, kita publikasi di sana. Kemudian ada satu lagi majalah, Majalah

Sembada, itu kontennya sama dengan Varian. Kita 1 tahun keluar 4 sampai 5, Akar 2, Varian 2, Sembada 1. Terus selain itu, saya juga yang masalah di hal di televisi, radio, sama kalau ada *press release*, kita ada apa ada event apa, ada press conference, kita yang *handle* dari publikasi. Terus kemudian ada lagi... Pameran Potensi, itu kita ada 2 kali, yang 1 diselenggarakan di Deggung dan kedua diselenggarakan di Alun-alun Utara, Sekaten. Terus kita juga menyiapkan materi sambutan Bupati. Sambutan Bupati artinya kalau Bupati ada event membuka apa, atau meresmikan apa, itu kita menyiapkan materinya untuk Bupati, kemudian kita koordinasi dengan instansi terkait tentang momentnya Pak Bupati meresmikan apa atau membuka apa.

3. Itu materi sambutan hanya dibuat untuk Bupati saja?

Kita hanya Bupati, tapi Bupati kan biasanya berhalangan, lalu mendisposisi Wakil Bupati atau Sekda. Jadi yang mengeluarkan sambutan hanya Bupati.

4. Lalu apa lagi produk kehumasan yang lain Pak?

Kita ada annual report, itu untuk sebagai apa ya... Kita membuat laporan yang eksklusif yang memang untuk tamu-tamu tertentu, Sleman kan sering ada kunjungan dari tamu-tamu, baik itu dari luar sampai ke pengusaha skala besar mau berinvestasi, kita ada annual report yang kontennya masalah ketatalaksanaan pemerintahan sampai dengan progresnya, tata kinerja Sleman dan juga potensinya apa saja, disitu ada. Kita juga bikin kalender, ya memang itu menjadi salah satu media kita untuk memberikan informasi pada masyarakat. Ya muatan lokalnya kita kentalkan di situ. Misal di kalendernya itu ada event-event khusus Sleman itu apa aja, kita publish juga disitu. Jadi orang-orang melihat kalender Sleman itu bisa tau, besok Sleman ada acara apa misalnya.

5. Kalau semisal untuk komunikasi internal di Sleman sendiri, antar instansi?

Jadi kita, tiga Subbag ini sangat saling terkait. Jadi misalnya ada suatu acara, di SKPD, mungkin di kecamatan atau di Dinas Koperasi atau Kantor

Penanaman Modal, atau Tenaga Kerja, biasanya kita seperti Brebah kemarin ada moment masyarakat mengembalikan Kartu Miskin misalnya. Nah, itu dari kecamatan mengundang kita Kabag Humas untuk hadir menyaksikan, itu biasanya Bu Kabag memberi disposisi satu surat itu ke tiga Subbag. Jadi, di protocol untuk mengatur acaranya untuk keprotokolerannya Pak Bupati. Setelah protocol mengandekan, disponya lalu berjalan ke tempat saya, saya menyiapkan sambutan, materi-materi sambutannya. Sekaligus saya mempersiapkan diri untuk hasilnya itu saya buat press release ke wartawan, kemana saja, apa saja termasuk juga kita yang mengarange untuk mengundang pers untuk meliput acara tersebut. Terus kemudian dari saya, jalan lagi ke dokumentasi, teman-teman di dokumentasi nanti mempersiapkan diri untuk mengirim orang ke sana, ikut dengan protocol untuk mendokumentasi moment sekaligus me-*record* pelaksanaannya baik dari *statement* Pak Bupati, Pak Camat atau pun *statement* dari masyarakat itu apa nanti dari situ diserahkan ke saya lagi untuk dikemas jadi *press release* kemudian dipublish lagi. Kita juga ada media website www.sleman.go.id kita kontennya, kita yang ngelola humas, kita juga punya sub web. Jadi kita *publish* ada beberapa. Jadi hubungannya dengan SKPD itu, yang pertama kalau ada acara, mekanisme itu. Kita mengirimkan surat ke kita, kita berkoordinasi, yang kedua kalau kita menyiapkan materi sambutan untuk Pak Bupati, atau menyusun *annual report* kita mengundang SKPD atau telepon untuk minta data. Data itu nanti disimpan di Pak Helmi, Subbag Dokumentasi dan Informasi. Jadi misalnya, Pak Bupati mau menyambut Menteri Pertanian misalnya, saya untuk membuat sambutan tentunya saya berkoordinasi dengan Dinas Pertanian produksi padi untuk tahun 2010-2013 ini gimana perkembangannya? Turun apa naik? Kemudian trennya gimana, volume produksinya berapa ton? Surplus atau enggak? Itu kita minta dari sana untuk dituangkan ke dalam materi sambutan itu.

6. Itu kan dalam kerja resmi/ formalnya ya, Pak. Semisal seperti hubungan antar instansi dalam kemas informal?

Kita, di Sleman ada Paguyuban Pejabat itu rutin diselenggarakan, itu muter jadi semacam arisan. Nah itu selain untuk silaturahmi, juga untuk berbincang-bincang menyelesaikan permasalahan secara informal. Ya memang ini seringkali lebih efektif, kadang-kadang. Tapi untuk karena ini sebuah birokrasi dari tata pemerintahan itu tentunya setelah ada informal itu kemudian dituangkan ke dalam bentuk rapat yang formal, sebagai landasan yang kuat untuk menindaklanjuti sebuah mungkin isu atau permasalahan.

7. Terus semisal release, buletin, majalah, tabloid itu jangka waktunya berapa ya Pak?

Kalau release, hari ini ada kegiatan ada moment sore sudah kita kirim. Hampir setiap hari ada. Kalau buletin ya rata-rata 2-3 bulan sekali. Kalau *annual report* setahun sekali.

8. Kalau hubungan dengan wartawan, cara menjalinnya?

Cara menjalinnya, kita di sini Sleman itu kita fasilitasi untuk membuat Paguyuban namanya PWPS (Persatuan Wartawan Peliput Sleman). Itu kita sendiri menyerahkan ke mereka, untuk mencari yang dituakan di Paguyuban itu siapa. Kemudian mereka bertemu sebulan sekali atau apa, kita fasilitasi tempat di ruang per situ kita sediakan tempat buat mereka, terus kita juga siapkan untuk membantu mempermudah kerja mereka kita juga siapkan tiga unit komputer di ruang pers itu yang online juga, jadi mereka dari dekat sini ada liputan tentang Sleman, bisa ke humas menulis kemudian mengirimkan ke sana. Terus kemudian kita juga ada *press tour*. Kita ngajak temen-temen wartawan sebulan sekali itu jalan-jalan. Misalnya di Minggir ada *home industry* Mendong, mereka kita ajak ke sana. Kira-kira ada 20-30 orang. Itu dari media cetak dan elektronik.

9. Kalau untuk mengetahui informasi kehumasan, tapi yang berada di luar lingkup Sleman bagaimana Pak?

Kita ada forum, namanya Bakohumas itu baik di skala nasional, propinsi. Informasi yang dari luar kita sharingnya lewat situ. Seperti kemarin humas Sleman diundang ke Kulon Progo, nah itu kita ke sana. Biasanya Kabag langsung.

10. Kalau dengan organisasi humas tapi yang bukan pemerintah, semisal Kapurel? Kami belum pernah berinteraksi intens dengan organisasi di luar struktur pemerintah secara intens itu belum pernah dilakukan. Tapi ya belum tahu apakah akan intens atau tidak. Studi banding ke luar biasanya kita ajak wartawan, dalam konteks *press tour* dalam rentetan 12 kali ini ada salah satu yang keluar.

11. Kalau untuk menampung aspirasi dari bawah ke atas?

Aspirasi itu ada internal, eksternal. Internal itu ada dari internal birokrasi, dari SKPD lain ada apa. Itu kita formulasikan melalui majalah, tabloid. Nah itu kita sisipkan di situ. Kalau yang dari masyarakat kita ada sms aduan, kemudian website resmi Sleman, itu juga ada aduan masyarakat secara interaktif. Nah, kemudian kita akan *me-record* itu kemudian kita akan naikkan ke atas, yang nanti ini akan kita koordinasikan dengan instansi terkait. Misal ada keluhan masalah jalan, nanti kita kontaknya ke PU.

12. Berarti bisa dikatakan komunikasi internal maupun eksternal sudah berjalan baik ya Pak?

Sudah. Sudah kita akomodir semua untuk keperluan komunikasi itu. Solusinya kita tidak bisa memberikan sendiri, kecuali sudah ada pertanyaan dan pertanyaannya sama dengan yang dulu, kita *copy paste*. Tapi kalau sesuatu yang baru, kita naikkan, kemudian dikonfirmasi dengan instansi terkait.

13. Kalau semisal ya Pak, Sleman sedang diterpa isu yang dampaknya bisa dikatakan negatif bagi Sleman, sejauh mana keterlibatan humas dalam penyelesaiannya?

Ini kan sebetulnya sebuah strategi yang harus dimiliki humas, jadi ada sebuah informasi atau kejadian yang itu negatif. Dari kejadian negatif itu bagaimana humas mengolah itu menetralkan itu tentunya dengan data-data yang dipunya untuk menjadi sebuah berita yang sifatnya konstruktif atau meluruskan. Kita sendiri kalau memang ada berita yang sangat *urgent* untuk ditanggapi, kita biasanya langsung rapat internal kemudian langsung membahas tentang itu seperti contohnya waktu ada pertemuan pejabat di Kinahrejo terus kemudian naik kendaraan untuk *off road* itu terus kemudian terjadi kecelakaan. Itu kan sebetulnya hal yang sangat merugikan industri pariwisata, karena kalau itu tidak kita sikapi berita itu, akan keluar dan akan dibaca orang se-Indonesia kemudian mereka akan takut ke Sleman. Sebenarnya itu kan menjadi salah satu ikon Lava Tour, ada kejadian itu mereka akan berpikir, “Wah, itu gak *safe*”, mereka tidak akan menggunakan fasilitas itu atau mungkin juga yang menjadi ikon itu menjadi meredup. Nah kita segera melakukan koordinasi internal menyikapi berita tersebut lalu kita membuat telaah yang kemudian kita koordinasikan dengan Dinas Pariwisata, kemudian juga Dinas Perhubungan Sleman, untuk memberi formulasi ke depan apa yang harus kita lakukan untuk menyikapi kejadian yang sudah terjadi itu. Kita memang di berita yang akan kita keluarkan tentunya tidak terlepas dari bercerita dari kejadian fakta yang sudah ada. Untuk kemudian membuat berita negatif itu menjadi positif tentunya kita ada solusi yang sudah kita pikirkan dan kita terapkan di situ. Artinya selanjutnya kita dalam waktu sekian akan melakukan ini, ini, ini. Sehingga orang membaca, “O ini tidak *safe* tapi kemudian ada solusi, seminggu lagi, beberapa hari akan terkondisi menjadi *safe*, lebih *safe* daripada yang dulu”. Nah, itu kita selalu berpikir bagaimana membuat isu negatif menjadi positif. Jadi instansi yang saling terkait akan bekerja sama dalam hal penyelesaian isu.

14. Kalau menurut Bapak, keberadaan humas di Sleman memang sangat penting ya Pak?

Sangat penting, karena yang pertama fungsinya kita mendistribusikan informasi, menyaring informasi ataupun meluruskan informasi yang keluar. Kemudian yang kedua komunikasi internal, seperti yang masalah pariwisata itu tadi. Kalau pariwisata berjalan sendiri mungkin *treat*-nya akan lain jika ia sudah berhubungan dengan Dinas Perhubungan dan Komunikasi, dan sudah akan lain lagi dengan Pemdes karena itu kan terkait dengan kewilahan itu tadi, Kita untuk merajut komunikasi internalnya itu.

Wawancara dengan Pak Aga (Kasubbag Protokol Sleman) – Jumat, 6 September 2013

15. Menurut Bapak, humas di Sleman itu didefinisikan seperti apa ya Pak?

Peran yang selama ini saya tahu bagaimana membangun image, image itu dalam bentuk bisa komunikasi dalam arti tanda petik, menyampaikan kebijakan-kebijakan di Sleman itu dengan pesan-pesan yang mampu dipahami oleh baik itu internal maupun eksternal. Tapi kita lebih fokus kepada upaya-upaya perbaikan image secara eksternal. Artinya baik itu sifatnya *performance*, itu kalau kami protokol, bagaimana mengemas pesan yang disampaikan oleh teman-teman di protokol itu biar terkesan di masyarakat atau ketika membawakan acara itu betul-betul dalam kondisi siap. Tidak bias informasi ketika menyampaikan acara, bisa dipahami yang ikut serta dalam acara itu. Kita prinsipnya ke sana. Kemudian eksternal, kita lebih kepada penguatan kompetensi, staf-staf kami yang ada. Bagaimana menguatkan kompetensi mereka ketika dalam melaksanakan tugas mereka dalam kondisi siap, ini tentu yang sering kita lakukan adalah pengembangan kepribadian bagaimana tampil, karena yang menjadi fokus utama acara itu dimulai adalah MC. Kalau yang kedua lewat media, membuat *release* itu disampaikan ke eksternal. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pak Bupati dan yang membantu beliau, itu selalu dibuat *release* untuk disampaikan ke media. Itu media mau menerima terserah, yang penting kita sudah menyampaikan,

kebijakan internal media kan berbeda. Kemudian kita juga ada media internal sendiri, ada buletin, ada majalah, yang tidak kalah pentingnya adalah perilaku manusianya, humas yang dapat mencerminkan dirinya seorang birokrasi. *Image building*, sehingga kita kalau ada tamu-tamu di Pemda Sleman, yang pertama kita lakukan itu. Bagaimana kita menerima tamu dengan baik, bagaimana administrasinya, bagaimana proses penerimaannya, bagaimana protokolernya. Karena di sana protokoler itu menyangkut tata penghormatan, tata upacara dan tata tempat. Itu lingkup kerja humas. Karena otomatis juga akan menjadi image organisasi.

16. Kalau untuk yang kompetensi itu diberikan semacam pelatihan?

Yak betul, baik yang diprogramkan oleh kami sendiri, artinya lewat kegiatan-kegiatan kami. Maupun yang diselenggarakan oleh departemen yang berada di naungan kami, Depdagri, Kominfo seumpama, mengadakan pelatihan keprotokolan, kehumasan. Itu strategi-strategi yang digunakan untuk meningkatkan kompetensi. Kemudian yang lain lagi tentu kompetensi dengan sering menerjunkan staf. Artinya kalo staf itu sering, bagaimana dia bisa meningkatkan kompetensinya kalau tidak pernah ditugaskan, langsung praktik. Juga berkomunikasi dengan orang lain, yang sama profesi. Semisal dia protokol kota, protokol propinsi kita juga pernah berkomunikasi *brainstorming* dengan mereka bagaimana kegiatan-kegiatan protokol di propinsi. Bahkan dari istana negara pun juga kita pernah berkunjung ke sana untuk bertukar pikiran karena ada beberapa aturan yang ketika dilaksanakan di Sleman, ada benturan-benturan. Tapi setelah kita berkomunikasi di sana, ini kan juga untuk meningkatkan kompetensi kita bagian humas.

17. Semisal ya Pak, ketika Sleman mendapatkan suatu isu yang arahnya cenderung berdampak negatif bagi Sleman, bagaimana peran humas dalam hal penyelesaiannya?

Pertama, lingkungannya itu Kabag Humas. Tapi secara pribadi, pertama kita inventarisir persoalan-persoalan yang muncul. Mungkin masalah korupsi, yang

saya alami dan lihat, beliau Kabag berkoordinasi kepada pimpinan yang lebih atas lagi. Bagaimana informasi yang kita berikan. Yang kedua juga, karena itu proses hukum, ya biarkanlah berjalan sesuai dengan seharusnya karena itu sudah konsekuensi dari orang yang melakukan itu. Kalau kita membuat informasi yang mungkin membuat image yang, “wah, gak mungkin”, karena itu sudah muncul di Koran, yang jelas mungkin ada sela-sela yang bisa mungkin orang yang berbuat sudah berbuat baik, tapi yang saya lihat selama ini tidak dipublish, kadang-kadang kita dalam *counter* informasi juga kesulitan juga. Jadi biarlah berjalan apa adanya dan sesuaikan dengan prosedur hukum yang berlaku. Kalau kita langsung berbuat tanpa informasi memadai, nanti kita kesanya membela orang yang melakukan itu. Biarkan itu berjalan dengan sesuai aturan. Lalu, selalu teman-teman dari humas mereka informasi dari media, setiap pagi mereka inventaris berita-berita yang ada di Sleman, kemudian dikoordinasikan ke pimpinan dibuatkan ringkasan berita, kemudian pimpinan memberika catatan-catatan kemudian dikoordinasikan dengan instansi terkait.

18. Kalau yang dilakukan humas untuk mengupdate informasi mengenai kehumasan yang di luar Sleman?

Selama ini mungkin, saya pernah ikut Bakohumas yang di NTB kalau tidak salah, Bakohumas itu kan kegiatannya *sharing* informasi. Bagaimana sih aktivitas yang dilakukan humas di masing-masing daerah, di sana diberikan gambaran secara umum, kerja humas secara keseluruhan kemudian masing-masing daerah itu menyesuaikan kebijakan informasi di tiap daerah namun alurnya tetap mengacu pada UU, karena masing-masing daerah memiliki hasil sendiri-sendiri. Seperti di Sleman yang latar belakang pendidikan bagus, mungkin DIY secara keseluruhan, mungkin disbanding dengan yang ada di Papua, Sulawesi, Sumatera itu kebijakan masing-masing daerah itu akan berbeda. Tapi pada intinya, kebijakan humas itu mengacu pada aturan yang telah diatur. Kemudian kita membuat laporan, kebijakan keseluruhan yang

kita lakukan seperti ini seperti ini, gambaran masing-masing humas masing-masing daerah seperti ini.

19. Jadi dengan mengikuti ajang seperti Bakohumas, memang menjadi cara untuk saling bertukar informasi ya Pak?

Iya, jadi mengetahui bagaimana perkembangan humas di masing-masing daerah karena masing-masing daerah melaporkan keadaan pekerjaan humas di masing-masing daerah. Tapi kadang diwakili oleh propinsi karena saking banyaknya daerah yang ikut serta.

20. Selama ini bagaimana cara humas untuk memfasilitasi komunikasi baik internal mau eksternal Sleman?

Beberapa kegiatan, mereka ada komunikasi Pimpinan dan Staff. Forum Pimpinan, itu disediakan forum dari humas, di situ dihadiri oleh pimpinan dan staf-staf di masing-masing SKPD biar mereka itu ada komunikasi. Kemudian dengan media yang sering dibuat oleh humas, kemudian diterbitkan ke masing-masing SKPD. Lalu berikutnya juga masing-masing sepertinya Dinas Pertanian misalnya, membuat tulisan mengenai permasalahan tertentu, dibuat dalam suatu tulisan kemudian dimasukkan di Varia atau di Majalah Sembada. Itu kan merupakan salah satu cara untuk berkomunikasi dengan masyarakat, media. Atau juga ada, wawancara khusus mengenai berita yang memang sedang berkembang di masyarakat. Misal asal DB di Sleman.

21. Berarti memang Sleman berusaha untuk selalu menjaga hubungan baik dengan publik internal dan eksternal tanpa ada suatu batasan?

Oh iya tidak ada. Memang saya rasa begitulah tugas humas, yang baik, baik itu secara internal dan eksternal. Tapi kadang-kadang juga timbul yang namanya persoalan-persoalan yang memang itu harus dikomunikasikan dengan pimpinan. Kami tidak membuat cara jika ada masalah-masalah secepatnya dibuat dijelaskan, artinya humas memberi peran kalau itu terkait dengan masyarakat, mengundang pers, membuat *press conference* untuk

mengundang teman-teman dari media, dari instansi tertentu juga. Itu dilakukan dengan cara *coffee morning*, nah itu kan merupakan salah satu cara. Sehingga komunikasi dengan dinas terkait dengan masyarakat, yaitu dengan media itu bisa berjalan baik.

22. Kalau dengan wartawannya sendiri Pak?

Oooo bagus mbak, bahkan di sini mereka ada fasilitas sendiri, *press room*. Itu juga sudah menjadi tugas humas untuk menjaga komunikasi yang baik dengan wartawan, karena kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Pemda berkaitan dengan isu atau kebijakan tertentu dari pusat tidak mungkin langsung kita berikan kepada masyarakat, pasti lewat media.

23. Kalau *release* setiap ada ya, Pak. Kalau seperti buletin, tabloid, majalah, itu jangka waktunya seperti apa ya Pak?

Jangka waktunya, 2-3 bulan sekali. Kita mengumpulkan informasi dulu, baru dibuat formulasi beritanya dan terakhir di terbitkan.

24. Peran atau keikutsertaan humas dalam event publik Pak?

Kita dengan cara pameran, mungkin juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan budaya. Artinya di sana kita juga menyampaikan visi dan misi Pemda Sleman lewat budaya dengan informasi kebijakan yang sifatnya yang bisa dicerna oleh masyarakat.

25. Menurut Bapak, seberapa penting keberadaan humas di Sleman ini?

Oooo... Penting sekali, sangat penting, karena di sana kan mengelola informasi, mengelola pesan dan juga kebijakan-kebijakan Pemda itu disampaikan tidak menimbulkan efek informasi yang berlebihan. Artinya begini, sesungguhnya humas itu lebih kepada pengemasan informasi yang disampaikan oleh pemegang otoritas. Artinya begini, mau otoritas itu memiliki otoritas untuk menyampaikan informasi karena lalu yang punya otoritas itu kan tidak terlepas dari kepentingan yang sifatnya politik,

bagaimana kepentingan-kepentingan yang tadi itu diminimalisir oleh humas. Humas itu saya rasa masih sangat penting.

Wawancara dengan Pak Helmi (Kasubbag Dokumentasi dan Informasi Sleman) – Senin, 16 September 2013

26. Menurut Bapak, humas di Sleman itu didefinisikan seperti apa?

Humas di Sleman adalah bisa dilihat dari institusi bisa, diartikan sebagai alat pemerintah untuk mendukung atau menyupport kegiatannya jadi kalau arti yang pertama itu institusi itu kan wujudnya pertama bagian humas terdiri dari strukturnya, bagiannya, orangnya, tujuannya ada anggarannya ada tata kerjanya, di situ itu tugasnya institusi. Nah, institusi itu kerjanya kehumasan khususnya. Kemudian secara alat kerja adalah pemerintah agar bisa dia bisa bekerja efektif bekerja mencapai tujuannya pemerintah di Sleman secara spesifik kesejahteraan masyarakat, maka dia harus membutuhkan peran kehumasan untuk pertama pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan dari masyarakat, nah untuk salah satu cara untuk bisa menggerakkan *supporting* masyarakat itu adalah dengan humas. Yang kedua untuk menginformasikan apa-apa, pemerintah yang bekerja atas nama rakyat maka ia harus bertanggung jawab pada masyarakat. Bertanggung jawab itu alatnya dengan humas, jadi humas dapat menyampaikan hasil-hasil apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Kemudian sekaligus juga seringkali persepsi yang dikerjakan oleh pemerintah ini berbeda dengan apa yang dipersepsikan oleh masyarakat. Jadi tugas humas dan fungsi kehumasan yaitu agar persepsi itu dapat disamakan.

27. Berarti kalau secara garis besar ya, Pak. Tugas humas di Sleman ini apa saja ya?

Jadi secara garis besar, penghubung antara pemerintah dengan masyarakat.

28. Meliputi apa saja ya Pak? Karena di Sleman ini humas terdiri dari tugas Subbag.

Iya, jadi ketiga hal itu tidak dapat dipisahkan. Jadi agar fungsi tersebut dapat bekerja sebagai penghubung itu, ya ketiga Subbag ini harus saling terhubung. Karena dokumentasi itu mendokumentasikan informasi dari pemerintah, yang mempublish menginformasikan secara efektif dan efisien kepada masyarakat itu kan publikasi. Nah yang protokol itu fisikli pemerintah, jadi yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan pihak lain juga.

29. Di Sleman katakanlah sedang mendapat pemberitaan dari luar yang berdampak negatif bagi Sleman, sejauh mana keterlibatan humas dalam penyelesaiannya?

Jadi karena yang ditugasi Pemerintah Sleman yaitu juga ada tugas pokok dan fungsi, yaitu salah satunya tugas dari Bagian Humas meng-clear-kan informasi baik yang dari dan ke masyarakat ke Pemda Sleman, maka kalau ada berita yang nganu ya sesuai dengan tupoksi yang kita miliki kita lihat dulu apa beritanya, ternyata setelah kita lihat beritanya tidak benar, kita harus membenarkan itu dengan berbagai macam cara yang sesuai dengan ketentuan, misal dengan hak jawab dengan klarifikasi.

30. Yang dilakukan Humas Sleman untuk memfasilitasi komunikasi baik internal maupun eksternal bagaimana Pak?

Kalau eksternal medianya *press conference*, *release media*, kemudian kita ada mekanisme interaksi langsung. Di TV ada Dialog Sembada. Di Radio ada Bupati Menyapa. Kemudian setiap hari kita membuka berbagai macam kanal, supaya jika masyarakat ada pertanyaan, keluhan ada aduan, bisa langsung direspon atau kita jawab artinya bisa kita tindak lanjuti. Ada web, ada surat warga, ada layanan sms, ada pelayanan telepon, fax, melalui surat pembaca. Kemudian kalau internal kita ada semacam forum, kita membikin forum yang melibatkan berbagai macam instansi, misalnya ada permasalahan apa yang intinya bagaimana agar kerja kita efektif misalnya. Oh kita perlu pelatihan manajemen, kepemimpinan misalnya, kita membikin forum bekerja sama dengan perguruan tinggi, dengan praktisi kita di situ. Ada juga kita membikin

semacam media internal gathering, jadi kita mengundang berbagai macam instansi atau instansi yang terkait atau instansi yang dianggap perlu, kita adakan gathering, kita rembug bersama, artinya dengan cara-cara yang sifatnya informal itu bisa cair, kalau yang formal seperti forum pimpinan misalnya.

31. Berarti dengan cara-cara atau wadah seperti itu, opini baik itu dari atas ke bawah maupun bawah ke atas bisa tersalurkan dengan baik?

Iya, karena ada forum-forum komunikasi tersebut.

32. Kalau yang dilakukan Humas Sleman untuk mengupdate informasi mengenai berita kehumasan di luar Sleman?

Kita difasilitasi oleh Kominfo, melalui Bakohumas. Kalau propinsi oleh Pemda DIY. Jadi Pemda DIY ini ada forum kehumasan, kalau Kominfo tarafnya nasional. Kita juga ikut serta di sana. Kita mengirim ke sana, setelah itu kita membagikan ke teman-teman yang lain. Itu sarana formalnya. Kemudian saranya informalnya, yaitu biasanya kita sering juga Bakohumas mengirim booklet kemudian kita juga ada buku tentang kehumasan kita cari, kita persilakan teman-teman untuk mengakses itu. Atau kalau memang perlu dari web yang dianggap penting, akan kita printkan. Kemudian ada rapat staff khusus humas, semisal ada perkembangan terbaru mengenai kehumasan, kita sampaikan di sana. Kita juga memberi kesempatan pada staff humas untuk menambah pendidikannya dengan sekolah, tugas belajar atau ijin belajar.

33. Kalau produk kehumasan yang dihasilkan?

Ada majalah internal juga bentuk komunikasi internal terdiri dari 1 majalah dan 2 tabloid, kemudian yang untuk eksternal ada *release* yang jelas, kemudian ada foto ada video. Kemudian kita juga membikin profile, ada juga yang *annual report* untuk laporan kerja tahunan itu bentuk buku ada juga bentuk cd. Kita juga profile khusus video, profil pertanian, perindustrian, perdagangan misalnya, ada.

34. Jangka waktunya Pak?

Majalah itu idealnya kami, setahun 3 kali, tabloid setahun 4 kali. Tabloid itu 2 bulanan, kalau majalah itu 4 bulanan. Itu idealnya, tapi kita bikin tergantung dari anggaran Kabupaten berapa diplotkan, kita menyesuaikan itu.

35. Media terkait erat dengan peran wartawan ya, Pak. Yang dilakukan Humas Sleman untuk menjaga hubungan dengan media seperti apa saja ya Pak?

Jumpa pers, atau dengan bentuk kita ngopi bareng, lebih santai. Kemudian ada media gathering, kita adakan di luar dengan kita ada narasumbernya, jadi dari akademisi misalnya, jadi ada awacana pembeding. Kemudian ada *press tour* keluar dan ke dalam daerah.

36. Jangka waktunya, Pak?

Setiap dua minggu sekali ada ngopi bareng, bentuknya seperti *press conference* tapi dalam bentuk informal. Itu yang rutin, media gathering rutin, *press tour* sebulan sekali, kalau yang keluar daerah setahun sekali. Kalau di dalam daerah, kita berkunjung ke Kecamatan atau Desa-desa yang memiliki potensi yang belum tergali.

37. Sejauh mana pentingnya keberadaan humas di Sleman ini?

Sangat-sangat penting karena menjadi alatnya pemerintah untuk berkomunikasi dengan masyarakat, komunikasi yang baik, cara komunikasi dan juga konten komunikasinya, baik itu sesuai dengan apa yang terjadi dan juga diharapkan bisa diketahui masyarakat bahwa pemerintah sudah bekerja dengan benar, maka masyarakat juga akan ketika diajak berpartisipasi juga akan mau.

Wawancara dengan Bu Uut (Kabag Humas Sleman) – Senin, 16 September 2013

38. Menurut Ibu, humas di Sleman itu didefinisikan seperti apa ya, Bu?

Jadi konsep humas kalau menurut saya, lho.. Ya, humas pemerintah itu bisa membantu pimpinan di dalam mengelola manajemen komunikasi, walaupun demikian tentunya di dalam mengelola manajemen komunikasi ini tidak sekedar membantu merencanakan apa yang perlu dikomunikasikan, tetapi juga membantu bagaimana kita memberikan fasilitas layanan kepada masyarakat di bidang komunikasi, sehingga ada hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah dengan masyarakat artinya bahwa hubungan yang harmonis tidak hanya berarti bahwa “oh, Pemda dan masyarakat itu saling bisa mengkomunikasikan”, tidak hanya itu tetapi bagaimana menciptakan kesamaan tujuan, pemahaman untuk mencapai visi misi pemerintah kabupaten, karena visi dan misi institusi kan tentunya. Nah, kemudian di situ diberikan beberapa cara yang harus dilakukan, nah, tentunya ini kan berorientasi kepada fungsi-fungsi hubungan masyarakat yang harus dilakukan kan. Tetapi tentunya, fungsi-fungsi ini kan tergantung dari apa yang kita hadapi saat ini dan fungsi itu bisa berubah, artinya tahun ini dengan tahun kemarin, tahun depan, jadi sangat dinamis gitu, lho. Terus kemudian, bahwa selain berfungsi untuk manajemen komunikasi untuk membantu pimpinan, ini humas juga punya peran bahwa humas ini juga menjadi apa ya.. Bukan juru bicara, tapi menjadi agen untuk menginformasikan baik itu kebijakan pemerintah daerah, kemudian kegiatan yang ada di masyarakat atau mungkin terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat. Ini bisa dikomunikasikan. Jadi kalau saya lihat kan seringkali dilihat sebagai juru bicara, kalau juru bicara kan ini kan hanya artinya kan humas kan tugasnya dari pimpinan, “Ini lho, *statement*-nya kamu *statement*-kan”, tapi bukan seperti itu sebenarnya humas itu. Tapi bagaimana bisa meramu sebuah komunikasi yang bisa memberikan pemahaman kepada publik. Jadi kebetulan kalau di Sleman kita juga memiliki komitmen kan ya, dari sejak dulu bahwa humas diberi kepercayaan untuk mengkomunikasikan semua hal. Jadi,

misalnya bahwa tidak harus saya ketika menginformasikan sesuatu menunggu disposisi atasan, misalnya begitu. Tetapi kita bisa melihat apa sih, sekarang yang dibutuhkan masyarakat, informasinya, ada permasalahan di masyarakat kita bisa segera memberikan penjelasan ke masyarakat. Ini kan perlu komitmen pimpinan, artinya pimpinan sudah mendukung bahwa humas harus bisa berperan seperti itu lho.

39. Sleman kan sudah menjadi daerah otonom yang memiliki regulasinya sendiri. Begitu pula dengan struktur organisasinya. Nah, menurut Ibu mengapa humas di Sleman ditempatkan pada posisi tersebut?

Jadi kan gini, secara teoritis ya kalau kita melihat, keberadaan humas itu harus ada di dekat CEO kan, kalau itu di perusahaan profit. Seringkali itu adalah bagian dari CEO. Demikian juga untuk di Pemerintah Daerah, cuma kalau di Pemerintah Daerah ada aturan bagaimana kita membentuk sebuah organisasi. Nah, salah satu kalau saya pribadi ini bahwa humas di bagian Sekda ini ya cukup tepat gitu lho. Karena bahwa dulu pun ketika ini kan humas pemerintah bervariasi ada yang di Sekretariat, ada yang di bawah Kominfo dan sebagainya, tetapi kan dengan aturan mulai agak seragam bahwa humas harus di Sekretariat Daerah. Nah, waktu itu saya pernah diundang ketika menyusun modul SCBD, itu waktu itu kan kebanyakan kalau humas itu berada di Kominfo, karena pada itu ada kantor kominfo, otomatis kalau di situ Eselon II, sedangkan humas kalau di bagian itu adalah Eselon III. Nah, waktu itu banyak orang yang meminta ini harusnya masuk di Kominfo, tetapi terus terang waktu itu saya memiliki telaah bahwa tidak tepat kalo di Kominfo gitu lho. Humas itu yang tepat ya di Sekretariat Daerah. Mengapa? Bahwa Sekretariat Daerah adalah institusi yang membantu pengelolaan kebijakan yang nantinya akan dipakai oleh Bupati. Nah, otomatis kalau kita di Sekretariat, hubungan kita memang benar-benar dekat dengan CEO, CEO kita siapa? Adalah Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda, karena kan Sekda itu adalah pejabat birokrat tertinggi, kalau Bupati dan Wakil Bupati adalah pejabat negara. Nah, ketiga orang ini adalah CEO kita. Jadi apapun pembentukan kebijakan mesti lewat

sekretariat, sehingga komunikasi kita mudah. Kemudian demikian juga keberadaan kita akan secara fisik pun mempermudah kita untuk menjalin komunikasi gitu lho. Jadi walaupun struktur kita itu berada di bawah Sekda, karena Assekda itu kan tugasnya membantu Sekda kan gitu, nah kami membantu juga Sekda, tetapi di bidang yang lebih teknis kan gitu. Nah ini ternyata merupakan langkah yang strategis bagaimana kita untuk lebih mempercepat memahami semua permasalahan kebijakan yang digodog oleh Pemda, nah menurut saya di sinilah tempunya humas itu lebih pas gitu lho. Kalau bagi saya seperti itu. Kemudian yang kedua, kan sehingga kalau ada permasalahan kita kan segera tahu, kalau permasalahan regulasi kita juga dilibatkan. Kemudian nah di dalamnya humas, ini kan kalau di kita ada tiga Subbag kan ya. Ada Publikasi, Dokumentasi Informasi, satunya Protokol. Mengapa Protokol dimasukkan ke humas, kan gitu. Ada yang lain kan Protokol dijadikan menjadi sebuah bagian, misalnya kan di kota, mengapa. Karena kan kita humas itu, nanti outputnya harapannya tujuannya humas itu apa sih? Kita bisa menciptakan hubungan yang harmonis kan, antara institusi dan pimpinan. Terus kemudian, citranya bisa terpelihara kan gitu. Juga bisa memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat pada publik internal maupun eksternal kita kan gitu. Sehingga kan Protokol, Protokol itu kan tugasnya adalah juga mengatur pimpinan, mengatur acara, ini kan juga citra, pencitraan, sehingga kan sebuah kegiatan itu kan akan berhasil kalau ada yang mengatur, mendokumentasikan, adanya yang mempublikasikan supaya masyarakat tau. Alur pikir inilah yang menjadikan mengapa humas itu ada tiga Subbag itu tadi, nah disitu. Sehingga ketika kita ada acara sebenarnya, “Oo Protokol, peranmu adalah mengatur ini, Publikasi peranmu adalah menyiapkan sambutan nanti mengundang wartawan, mempublikasikan, Dokumentasi Informasi tugasmu adalah mendokumentasikan, mungkin mengelola databasenya, dan sebagainya”. Nah, seperti itu kan secara kelembagaannya seperti itu.

40. Menurut Ibu, ketika ada pemberitaan atau isu-isu yang katakanlah bisa berdampak negatif bagi Sleman, bagaimana keterlibatan humas dalam hal penyelesaian masalah tersebut?

Jadi kan gini, kita itu di dalam ini sudah menyangkut kepada layanan pemberitaan untuk layanan informarsi dengan media, kita sudah terbentuk namanya Peraturan Bupati yang menyatakan bagaimana kita kan di Pemda ada dinas-dinas yang namanya SKPD, bagaimana SKPD ini bisa memberikan layanan ke wartawan. Jadi sebenarnya prinsip kita adalah informasi itu bisa diberikan siapapun kalau SKPD itu ya informasi teknis, humas itu adalah polose, umum, bisa juga ke teknis tapi datanya kita peroleh dari SKPD. Nah, permasalahan yang kita hadapi itu tiap hari, kita itu ingin membuat informasi yang sebanyak-banyaknya, tapi kan kita tahu bahwa teman-teman media itu kan tidak bisa memberikan informasi oleh satu sumber yang banyak di banyak berita, sehingga kita keluarkanlah Peraturan Bupati yang mengatur pelayanan ke media. Nah, disitu bahwa setiap yang boleh berstatment, bahwa adalah pejabat Eselon II, selain humas. Atau ada kepala SKPD yang kantor itu kan ada Eselon III kepalanya. Boleh itu dibawahnya, sekretarisnya, asal ada perintah dari pimpinannya. Nah kenapa ini dilakukan? Karena ini juga akan menjaga bahwa jangan sampai informasi yang disampaikan ke masyarakat itu ada kesalahan, karena ketika salah dampaknya semakin besar, nanti humas hanya sebagai pemadam kebakaran, kan gitu. Tetapi pimpinan kan juga bertanggung jawab apa yang diinformasikan ke luar. Nah, kemudian kalau humas sendiri apapun bisa disampaikan sendiri di sana. Cuma setiap hari kan kita mengeluarkan *release* minimal 3-5, mesti harus ada *release* yang disampaikan ke wartawan. Tentu saja di situ kan memang yang mengeluarkan Kabag Humas, kita email kan ya. Tapi kan teman-teman biasanya *confirm*, “Mbak ini biar pas, narasumbernya dari ini”, “Oke gapapa”, tapi kan yang buat kan kita semua, Nah itu kan yang kita lakukan. Kemudian besoknya, ketika yang dimuat, kita ada kegiatan monitoring berita. Nah, monitoring berita ini, jam 10.00 WIB itu sudah direkap ditaruh di meja pimpinan. Pimpinan kita siapa? Ya tadi, Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Assekda 1,2,3 kan

gitu. Nah fungsinya apa? Nah ini kalau ada permasalahan ya itu negatif atau mungkin permasalahan masyarakat perlu ditindaki dengan koordinasi dengan instansi yang lain, pimpinan tahu segera melangkah. Nah, kemudian kalau itu termasuk aduan-aduan masyarakat. Kita tuh kan punya aduan-aduan masyarakat namanya aduan melalui sms *gateway*, ada via email, ada di surat pembaca, atau yang telepon langsung bisa. Twitter ada, Facebook ada. Nah semuanya itu dirangkum untuk diberikan ke pimpinan. Itu menyangkut kalau berita, kalau negatif itu memang perlu kita klarifikasi, dari humas pun juga selain ada nota dinas kepemimpinan, monitoring tadi, kita juga klarifikasi ke dinas instansi terkait, ini sebenarnya berita seperti ini gimana sih? Nah kan gitu. Nah, terus oh ternyata kita sudah melakukan ini, oh ternyata ada kesalahan pemberitaan. Kalau ada kesalahan pemberitaan, kita ada lakukan Hak Jawab. Bukan kita misalnya, masalah berita tentang jaringan kesehatan. Kuesioner Jaringan Kesehatan Siswa Lanjut. Nah itu kan rame, saya begitu tahu, sore di twitter rame. Terus besoknya Dinas Kesehatan kontak ke saya, artinya ada saling koordinasi kan, ini perlu ada jumpa pers. Oke, kita jumpa pers sekarang. Kita jelaskan yang dipermasalahkan itu kan dari www.detik.com itu kan dianggap kuesioner vulgar, terus ini enggak bener tapi kok muncul di Sleman. Nah kita jelaskan, bahwa ini lho kita mengundang instansi teknis kan, ini lho kuesioner ini pusat yang buat, tidak hanya di Sleman dan Aceh saja. Kemudian kan sebenarnya kan disebar di seluruh Indonesia. Nah untuk di Sleman gimana nyebarnya? Nah ini kan sebenarnya kan ketika ngasihnya dengan petugas misalnya, dengan petugas UKS dan satu-satu, misal seperti itu kan dijelaskan, sehingga wartawan paham dan untuk meluruskan berita. Nah, ketika itu sore saya lihat di twitter, kok ternyata muncul lagi dengan pemberitaan yang sama yang judulnya pakai istilah “Kuesioner Vulgar: Apa Alasan Dinas Kesehatan Sleman terhadap Pengukuran Alat Kelamin?”. Terus ada lagi yang dengan kata-kata itu. Nah, kita sebagai petugas humas, ini kan tidak benar. Kan sudah dijelaskan seperti itu, tapi masih keluar kan. Nah, kita buat pelurusan Hak Jawab kita, menggunakan Hak Jawab kita langsung ke www.detik.com, nah kemudian

kita ke Dewan Pers dong, masalah pemberitaan. Kita suratkan ke Dewan Pers. Begitu itu langsung diterima, saya email sekitar jam 16.00 WIB di twitter jam 18.00 WIB sudah mulai muncul perubahan. Perubahan sesuai, karena saya minta itu perlu diluruskan pemberitaan itu. Akhirnya diluruskan. Kemudian ada salah lagi, jabatan saya. Saya buat lagi via email bahwa ini masih ada kesalahan, luruskan lagi. Diluruskan. Nah itu cara-cara kita meluruskan kalau memang permasalahan yang memang tidak sesuai dengan kondisi kita sebenarnya. Nah, tetapi misalnya ada kebijakan-kebijakan yang misalnya orang demo, misalnya demo kandang ternak, kita cek dulu permasalahannya seperti apa. Nah, ini kan tidak bisa langsung kita jawab. Dikoordinasikan dulu. Yang tugas mengoordinasikan siapa? Adalah pimpinan, yaitu Bu Asisten karena lintas sektoral. Nah kemudian setelah ada tindak-tanduk atau langkah-langkah kita perlu jelaskan ke masyarakat. Ini, lho langkahnya yang dilakukan seperti ini lho, kayak gini, lho. Tidak bisa misalnya, yang tadi masalah ternak, ternak itu sudah dari dulu, sedangkan perumahannya baru. Orang kan complain, nah ini kan perlu kita menjelaskan dengan memberikan duduk persoalan yang pas. Sehingga masyarakat pun paham, sehingga jangan sampai masyarakat itu, “Oh itu dekat rumah kok ada kandang ayam”, “Oh itu tidak bener”, tapi itu kan persepsi mereka, duduk permasalahannya yang kemarin seperti apa. Sehingga ini lho persoalan yang seperti ini sehingga penanganannya kita seperti ini, kita jelaskan juga. Jadi sebenarnya humas itu ketika ada yang negatif tidak langsung bereaksi bahwa kita membela diri, enggak. Itu justru yang negatif itu menjadi juga fungsi pengawasan dari masyarakat yang perlu dikonfirmasi dengan SKPD, dengan kita apa bener sih di masyarakat seperti ini. Kalau memang iya, kita harus benahi. Karena banyak juga lho misalnya hal-hal yang negatif yang kadang oleh wartawan dipublikasikan misalnya masalah penambangan. Oya kemudian kita kroscek. Ini kok kayak gini, ini memang tidak benar ni kayak gini. Kemudian menjadi masukan. Nah nanti efeknya ketika menginformasikan ya langkah kita yang sudah kita lakukan apa. Nah, seperti itu.

41. Berarti memang tidak hanya sendiri yang bekerja ya Bu?

Ya tidak, tidak bisa. Tidak bisa kita bekerja sendiri. Misalnya kayak gini, tidak hanya perannya ketika berita, lho. Misalnya kita melihat atau mendengar dari orang lain, “Oh, di sana itu ada permasalahan gini lho, masyarakat kekurangan ini atau ini kok ada di sana misalnya pembangunan yang membahayakan masyarakat. Apa ini benar atau enggak sih?”. Kita kroscek ke Dinas Instansi, Dinas Instansi kan bisa, “Oh enggak itu belum ada ijin dan sebagainya”, nah kita kan kadang-kadang membuat telaah kepada pimpinan bahwa kita mendapat informasi seperti ini, sehingga ini kan perlu dikoordinasikan. Sehingga kan masukan dari kita. Jadi ketika melaksanakan tugas tidak terpancang harus negatifnya di media, atau yang kita dengar dari opini masyarakat di luaran pun itu juga perlu kita sampaikan.

42. Aktivitas kehumasan untuk mengelola hubungan media bagaimana, Bu?

Banyak, jadi kan kita menganggap bahwa, jadi kan gini di dalam menjalankan fungsi komunikasi dengan masyarakat, humas tidak bisa melakukannya sendiri. Pemda Sleman tidak bisa melakukannya sendiri walaupun sekarang ada media jejaring sosial, tapi seberapa banyak sih orang yang bisa mengakses media jejaring sosial? Karena belum semua orang itu adalah melek internet kan. Nah kemudian salah satu alat komunikasi yang saat ini kita anggap masih memiliki audiens yang banyak dan loyal, itu adalah media baik itu surat kabar, TV, radio kan. Sehingga kita menganggap bahwa teman-teman wartawan atau media itu mitra dari kita. Jadi kenapa kok mitra? Jadi karena kita kan punya kepentingan dan mereka juga punya kepentingannya, hanya saja kan mungkin kepentingan di media itu dipengaruhi oleh visi misi bisnis dari media. Karena sekarang kan media bukan media untuk mengedukasi masyarakat, tapi dia memiliki orientasi bisnis kan. Nah kita punya peran juga, kita ingin mengedukasi masyarakat melalui media. Nah kita coba samakan visi ini. Naha bagaimana upaya menyamakan visi ini, kita harus melihat selama ini kan media-media itu kan tidak bisa menjangkau ke seluruh masyarakat Sleman kan. Padahal sumber berita itu tidak hanya di Kabupaten.

Nah sehingga satu, kita membantu memfasilitasi itu tadi, *press release*, kalau ada permasalahan yang krusial, kita mengadakan jumpa pers menghadirkan narasumber terkait. Pengetahuan wartawan itu kan pengetahuan apa yang dilakukan Pemda, selain di *release*, itu kan juga terbatas. Kemudian kan juga perlu dibangun sebuah hubungan antara wartawan dengan SKPD yang ada. Ini kan tidak hanya humas saja yang harus memiliki hubungan yang baik dengan wartawan. Tapi semua orang di Pemda ini harus memiliki hubungan yang baik dengan wartawan. Sehingga kita juga ada namanya Ngopi Bareng, jadi sekedar ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol, kemudian ada informasi yang bisa wartawan muat kemudian dia punya referensi ketika wartawan punya berita, dia bisa tahu harus menemui siapa. Terus kemudian kita ada *press tour* di dalam dan luar daerah. Nah kalau *press tour* di luar daerah. Kita ingin membuka wawasan dari teman-teman wartawan bagaimana pelaksanaan kebijakan di luar Pemda Sleman, yang akhirnya nanti ketika pulang ke Pemda Sleman, “Di Sleman itu sebenarnya bisa lho dikembangkan begini-begini”. Seperti yang di sana. Intinya membuka wawasan, sehingga jangan sampai bahwa ketika menilai itu, menulis itu, dia cenderung apriori, “O Pemda Sleman jelek, tidak bisa kayak gini”. Nah, tapi dengan melihat keluar itu kan bisa mungkin hal-hal yang belum dilakukan di Pemda Sleman bisa menjadi masukan tetapi mungkin kegiatan yang dilakukan di Sleman sudah lebih baik daripada yang dilakukan di daerah tersebut. Sehingga mereka terbuka wawasannya. Nah kemudian, *press tour* dalam daerah itu tujuannya adalah mengajak teman-teman wartawan ke lapangan di lokasi-lokasi yang sebenarnya mungkin dia belum tahu, yang tujuannya sekaligus *refreshing* juga mendekatkan dengan narasumber yang ada di bawah terutama adalah potensi-potensi daerah. Jadi yang dikomunikasikan tidak hanya kebijakan, tapi juga potensi-potensi masyarakat karena ini juga berdampak bahwa dengan mengkomunikasikan potensi di masyarakat kemudian ada masyarakat yang ingin juga memasarkan, membeli sehingga dampaknya kan juga ke kesejahteraan masyarakat kan gitu. Terus ada lagi namanya *gathering*, di sini pas puasa, atau mungkin pas kegiatan-kegiatan tertentu yang kita ingin

lakukan. Kemudian ada juga dengan *outbond*. Wartawan kita fasilitasi dengan pimpinan, dengan kita kan perlu ada keakraban dan *refreshing* kan. Sehingga jangan sampai bahwa SKPD atau orang takut dengan wartawan, susah. Sehingga nanti tidak terkomunikasi dengan baik selama sebenarnya wartawan itu perlu dilayani, dikomunikasi. Kalau dia salah persepsi yang diluruskan, dan kita pun dalam melakukan hubungan ini ada rambu-rambunya. Kalau memang sepanjang berita mereka sesuai fakta, oke gapapa. Kalau tidak sesuai fakta opini masuk, kita punya Hak Jawab. Dan Hak Jawab kan tidak usah memaki-maki atau berseteru dengan si penulis, tidak. Tapi kan kita institusional, jadi hubungan kita dengan wartawan ya tetap biasa. Karena kadang kita kan harus paham, humas pun juga harus paham mekanisme kerja wartawan. Kadang wartawan sudah nulis, tapi judul yang ngerubah redaksi. Kemudian yang kedua, bahwa mesti ada kebijakan redaksional di dalamnya misalnya. Nah ini kita harus kita pahami bersama. Idealnya kan seperti itu.

43. Lalu jangka waktunya sendiri Bu?

Jadi kalau *press tour* itu di dalam daerah, kita ada misalnya satu tahun itu 2-3 kali, yang luar daerah 1 kali. Terus untuk tahun ini kan kita ajak juga untuk liputan ke kecamatan melalui anggaran dana ini kita coba satu bulan itu 2 kali untuk turun ke kecamatan kan gitu. Karena di dalam melaksanakan publikasi pun kita juga telah melakukan penelitian, misalnya penelitian adalah seperti apa sih sebenarnya dari berita-berita yang dimuat oleh teman-teman wartawan itu, nah ternyata bisa diketahui bahwa misalnya Kompas itu beritanya cenderung di tempat kabupaten, berapa persen dia, kemudian KR, kabupaten itu berapa persen, kecamatan berapa persen, di desa berapa persen. Dari seluruh penelitian itu ternyata yang cenderung memiliki berita sama ke desa adalah hanya KR misalnya. Itu bisa kita pahami karena di KR kan banyak kontributor di tingkat bawah, sedangkan Kompas dan sebagainya kan orangnya tertentu. Tidak bisa memantau sampai bawah, kemudian pada waktu itu penelitiannya bahwa berita-berita yang termuat di media itu, itu di tingkat desa itu hanya sekitar 2% kalau tidak salah, kecamatan 3-4%, yang banyak

yang dilingkup Kabupaten. Nah dari situ kemudian kita buat perencanaan untuk tahun berikutnya. Jadi kita humas itu harus punya orang-orang yang membantu untuk memberitakan ini. Kan tidak mungkin orang di humas yang jumlahnya terbatas ini juga diterjunkan sampai ke kecamatan kecuali itu agenda Pemda. Kemudian kita coba ajak orang-orang desa yang memiliki tugas pengelolaan informasi. Siapa itu? Ya Kabag Umum. Kita ajak, kita lakukan buat Forum Jaringan Komunikasi dengan perangkat desa, kemudian kita latih nulis itu bagaimana, motret itu bagaimana walaupun itu juga belum berjalan dengan lancar karena tupoksi mereka bukan ini. Tapi paling tidak, mereka di desa ada kegiatan, bisa menginformasikan awal ke kita yang akhirnya nanti kita bisa fasilitasi itu untuk publikasi. Karena seringkali di desa ada Merti Desa, mereka menyurati kami bahwa ada acara tersebut, mohon dibantu liputannya. Teman-teman meliput, atau wartawan diundang ke sana. Jadi kan, informasi itu juga bisa dari bawah ke instansi.

44. Kalau produk kehumasan Bu?

Release setiap hari, buletin, majalah, tabloid juga ada. Tapi ini kan terkait dengan anggaran, makan jumlahnya terbatas. Jadi kita itu yang tahunan itu kita buat yang namanya *annual report*, ini kan bentuk pertanggungjawaban Bupati secara keseluruhan mengenai keuangan kan. Ini didistribusi sampai ke kelembagaan, kementerian, dan sebagainya. Lalu ada yang namanya Akar, itu untuk para petani. Kan mereka butuh pengetahuan teknologi kan, terus ini kita kerja sama dengan penyuluh-penyuluh pertanian. Terus ada yang namanya Varia Sleman, itu untuk mengkomunikasikan lebih ke kegiatan-kegiatan yang ada di Pemda Sleman dan masyarakat. Terus ada namanya Sembada, ini lebih kepada sosialisasi kebijakan. Terus kemudian ada *leaflet* dan *booklet*, ini ditujukan untuk para tamu. Kita juga punya subdomain humas, kita juga mengelola websitenya Sleman secara konten bersama dengan SKPD yang lain, kemudian kita juga ada twitter dan facebook.

45. Kalau untuk memfasilitasi komunikasi internal dan eksternal di Sleman seperti apa Bu?

Jadi kan gini, kita memang dua kan ya orientasi publik internal dan eksternal. Karena ini kedua publik ini tidak bisa ditinggalkan, tidak berarti kita orientasinya ke masyarakat lalu publik internal kita ditinggalkan. Untuk publik internal, kita biasanya tetap ada komunikasi-komunikasi baik itu misalnya koordinasi untuk misalnya ada acara selama ini orang-orang yang di kecamatan sana tau PNS yang staff jarang berkomunikasi dengan pimpinan, kita buat forum. Forum yang namanya dialog dengan pimpinan, ini ketika dialog ini ya kepala instansi tidak boleh datang, memang hanya staff. Jadi bisa terjalin komunikasi dengan gimana sih dengan staff itu mungkin ada unek-unek yang perlu disampaikan ke pimpinan dan sebagainya. Kemudian kita coba juga misalnya dengan kerja sama dengan Fakultas Psikologi, di sana ada dana pengabdian, kita buat. Ini perlu ada pengembangan wawasan kapasitas untuk teman-teman, misalnya sekretariat, staff, struktural dan sebagainya untuk perubahan masalah perubahan kepemimpinan, konsep ketika perubahan reformasi seperti ini, kepemimpinan seperti apa sih yang efektif. Kemudian kalau kita menghubungkan dengan publik eksternal secara langsung, itu paling kita bentuknya ada sosialisasi terpadu. Kita ada sosialisasi terpadu, jadi kan misalnya sekarang kan permasalahan banyaknya pelanggaran pembangunan, kan banyak rumah-rumah yang tidak ijin. Nah, itu terus gimana ini? Kan tidak bisa Pemda menangani sendiri kan tidak bisa, ini harus didukung oleh masyarakat kan. Karena masyarakat yang tahu, yang ada di bawah kan gitu. Nah kita buat. Kita koordinasi dengan SKPD yang terkait yang menangani masalah perijinan, penegak hukum, dsb. Kita buat, misal di Kecamatan apa kita mengundang tokoh masyarakat dan masyarakat di situ untuk ayo dikomunikasikan. Kebijakan Pemda seperti ini, supaya masyarakat bisa tahu. Sehingga mereka pun bisa membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi Pemda seperti ini. Lalu ada lagi, kita namanya juga Kelompok Informasi Masyarakat (KIKM), kita punya di 17 Kecamatan itu punya semua, dan ada 2 desa yang punya juga. Kita kasih, tiap ada acara kan

kita undang mereka. Dari sini kemudian secara tematik ya, bersama SKPD kita kasih narasumber, kita punya kebijakan ini, ini perlu disampaikan juga diteruskan juga kepada masyarakat yang lain. Karena mereka kan namanya KIKM, mereka kan berhak menyampaikan ke masyarakat kita fasilitasi pertemuan. Ada juga yang selain di kelompok ini, kita kadang-kadang juga bertemu dengan kelompok-kelompok yang lain yang masuk dari situ, membahas sebuah permasalahan misalnya tahun kemarin di Depok itu, masalah toko modern, kok toko modern masih ada masalah yang masyarakat menolak, ada yang nekad tanpa ijin dan sebagainya, ini gimana sih. Jadi memang perlu mempertemukan walaupun ketemu itu tidak langsung ketemu dengan acara yang besar kan tidak, tetapi ketemu dengan permasalahan yang khusus dan ini untuk memecahkan masalah itu.

46. Jadi humas memang berusaha untuk selalu memfasilitasi komunikasi baik itu dari bawah ke atas maupun atas ke bawah ya, Bu?

Oh iya.. Kalau misalnya ada usulan pun kita juga buat rekap. Jadi yang setiap hari itu tidak hanya aduan, tapi masukan, dan sebagainya kita akomodasi. Terus kemudia rekap-rekap permasalahan itu masukan-masukan itu kita rekap juga setiap tahunnya. Nah rekap itu nanti kita setorkan ke Bappeda, misalnya dari rekap itu masalah ijin, pelayanan perijinan, oh ini masalah apa, kita tulis dan direkap dijadikan satu kemudian kita serahkan ke Bappeda untuk masuk ke dalam pembahasan perencanaan.

47. Kan ini, Bu. Penting juga untuk humas mengetahui perkembangan terbaru perihal kehumasan yang tidak hanya di dalam Sleman saja, tapi juga di luar Sleman. Cara apa saja yang dilakukan Sleman untuk mengupdate informasi tersebut?

Banyak ya, kita kan ada peningkatan kapasitas. Biasanya mengirim teman-teman ke peningkatan kapasitas itu kan. Misalnya penulisan, terutama yang diadakan oleh Kominfo, Bakohumas Pusat dan Daerah, ada juga satu dua lembaga swasta yang kita nilai bagus misalnya penanganan krisis, kalau kita

punya dan atau kita koordinasi dengan BKD atau organisasi ada dana ya kita kirim, kita manfaatkan seperti itu. Kemudian yang kedua ada juga dari pertemuan-pertemuan koordinasi pusat, misalnya Bakohumas yang rutin diadakan. Terus kemudian yang ketiga, browsing karena orang kehumasan itu harus rajin browsing. Kita harus aktif.

48. Kalau forum, Bakohumas jelas ikut ya Bu. Kalau forum yang lingkupnya di luar pemerintahan. Misalnya Kapurel?

Kapurel kita kebetulan tidak, karena harus daftar ya. Ini belum. Tapi kita kan lihat dari hasil-hasil pertemuan Kapurel. Lagian kesulitan kita jika ada forum-forum itu adalah waktu. Jadi pernah kan kita diundang Kapurel, tapi waktu kita kan terbatas.

49. Menurut Ibu pribadi, setelah adanya kebijakan mengenai revitalisasi itu, aktivitas kehumasan di pemerintah dapat dikatakan menjadi semakin aktif. Berarti keberadaan humas di instansi pemerintah itu memang sangat penting ya, Bu?

Iya dan apa kalau saya melihat, dengan adanya revitalisasi itu mewujudkan bahwa ada komitmen pemerintah bahwa mengharapkan peran humas yang betul-betul optimal. Kalau dulu itu kan, belum ada revitalisasi itu, dan kita sangat terkait dengan komitmen pimpinan. Untungnya pimpinan di Sleman itu sangat mendukung untuk itu, tidak masalah. Tapi untuk daerah lain, saya melihat kadang-kadang orang humas itu kan anggapannya adalah orang buangan kan. Itu di mana-mana. Nah, kalau seperti itu dianggap orang buangan, bagaimana mau berfungsi, mau maju. Karena sebenarnya, kebetulan saya merintis mulai ketika saya ditempatkan sebagai PNS di Sleman, kan di humas. Humas jaman jaman tahun 90 itu ya fungsinya hanya buat sambutan udah, klipng sama shhoting, foto, tidak ada kegiatan yang lain. Nah, kemudian kita coba lah, buat berita, buat majalah, buat ini itu, sehingga samapai sekarang bisa dilihat kegiatannya seperti apa dan itu tidak mudah untuk membuat kegiatan seperti itu. Ketika humas belum ada revitalisasi itu kan

untuk melakukan perencanaan itu kan sangat tergantung dorongan pimpinan dan tim anggaran. Selama tidak ada anggarannya kan ya tidak bisa apa-apa kan? Terus akhirnya bagaimana kan kita bisa mengkomunikasikannya itu, misalnya dengan kita bisa memperlihatkan kinerja yang seperti ini. Sehingga nantinya bisa dianggap perlu. Misalnya seperti itu. Misal juga iklan luar ruang, anggarannya sedikit. Terus akhirnya itu perlu, kita mengajukan, lalu oke ini perlu. Jadi kita wujudkan dulu dengan dana yang sedikit itu, hasil kinerja kita seperti apa gitu lho. Misal layanan masyarakat di 21, itu kan humas yang buat. Itu kan tidak membayar. Kan kita mengajukan surat, dana yang kita butuhkan yang untuk buat tayangan yang hanya 5 menit itu. Nah ini kan gimana caranya produksinya sendirinya. Jelas kalau dengan pihak ketiga, uangnya tidak cukup. Nah kita buat itu, dengan karya teman-teman kita cek seperti apa, yaudah kita hasilkan seperti itu. Bagaimana kita mengelola uang yang sedikit itu bisa memperlihatkan kinerja yang optimal sehingga orang lain, tim anggaran itu melihat “perlu itu”, sehingga tahun depan kita alokasikan, dan pimpinan. Kalau hanya menunggu dari atas ya tidak akan dapat, harus aktif.

Umum terus membawahi itu Biro Umum, Humas dan Protokol terus Bagian Humasnya di bawah itu jadi satu bagian di bawah Biro Umum, Humas dan Protokol. Ada Protokol sendiri, ada Humas sendiri, ada Bagian Umum Sendiri. Ada tiga itu.

4. Menurut Bapak, mengapa Humas ditempatkan di posisi tersebut?

Iya, itu sudah peraturan. Ada peraturan dari pusat, ada PP-nya kalau humas memang posisinya ditempatkan di Sekretariat Daerah, karena Sekretariat merupakan lembaga birokrasi tertinggi yang ada di Pemerintah. Selain itu, semua kebijakan digodognya juga di Sekda, jadi ini merupakan posisi yang strategis bagi humas untuk berada di posisi ini. Selain itu juga, dengan keberadaan humas di Sekda, otomatis keberadaan humas dekat dengan pimpinan daerah.

5. Kalau yang menjadi tugas humas di organisasi?

Ya itu tugasnya itu, banyak kayak contohnya tadi. Nanti ada SPD, Siaran Pemerintah Daerah tiap bulan, ada Edisi Khusus, ada Edisi Bulanan itu. Ada jumpa pers dengan wartawan, siaran pers dengan wartawan pokoknya. Misal KPU mau penyuluhan masyarakat tentang Pemilu, kita yang memfasilitasi, di situ Ketua KPU ngomong di depan wartawan, wartawan nulis di media, jelas masyarakat. Fungsi humas itu, menjembatani.

6. Semisal ya, Pak di Pemda ada semacam masalah yang dampaknya cenderung ke arah negatif bagi Pemda, peran humas sejauh apa dalam hal penyelesaiannya?

Ya kita menjembatani. Kita bisa menjelaskan kepada masyarakat juga, terus kita memanggil atasan yang lebih tinggi untuk menerangkan ke masyarakat apa masalahnya, bagaimana penyelesaiannya. Dulu udah pernah juga masalah PRT dulu tentang UU PRT. Kan itu Perda di Gunung Kidul, pada gak terima, kita supervisi. Jadi memberi saran, masukan, ke pemerintah daerah tingkat II untuk memperbaiki itu.

7. Berarti ketika ada isu-isu, bukan hanya humas saja yang bekerja tapi saling koordinasi dengan pihak terkait ya, Pak?

Iya, saling koordinasi satu dengan yang lainnya biar selesai masalahnya.

8. Yang biasa humas lakukan untuk mengelola informasi terkini terkait dengan berita kehumasan, misal untuk update informasi dari luar melalui apa?

Melalui workshop kehumasan, lewat Bakohumas setahun tiga kali, kita mengundang humas-humas antar kabupaten/ kota, kita kumpulkan. Apa isu yang sedang berkembang di masyarakat. Kita kemarin dari Kalimantan Barat, ikut Bakohumas tingkat nasional, Solo iya. Kemarin ke Jakarta, Pak Is yang rawuh. Sebelum itu di Istana Wakil Presiden, saya yang hadir. Jadi harus terlibat aktif. Kita seluruh Indonesia punya *contact person*-nya. Kita juga ada pertemuan sebulan sekali dengan Kapurel, sini juga ikut. Tapi jarang datang karena saking sibuknya. Kita kedatangan nyelenggarakan itu setahun sekali.

9. Kalau untuk memfasilitasi komunikasi dengan pihak internal dan eksternal Pemda seperti apa Pak?

Untuk internal, memfasilitasi komunikasi antar instansi dan antar SKPD dengan sarasehan contohnya. Kemarin Pariwisata sosialisasi Perda tentang *Tour Guide*, kita yang sosialisasi, yang punya peraturan Biro Hukum, yang punya *gawe* Dinas Pariwisata, yang punya sosialisasi sini. Jadi tiga instansi terkait kerja sama bareng.

10. Produk kehumasan dari organisasi ini Pak?

SPD, *release* setiap hari, ada berita Gubernur ke mana, Wagub ke mana, nanti dibikin *release*, fotonya, video, nanti disiarkan lewat website www.jogjaprov.go.id terus setelah itu setiap bulan disiarkan lewat itu.. Majalah bulanan, SPD (Siaran Pemerintah Daerah). Ada di situ. Kalau *release*, disamping di website kita, juga disebarakan kepada wartawan. Itu di belakang ada *press room*.

11. Kalau semacam acara dengan wartawan Pak?

Ada, *press tour*. Setahun sekali, dua kali, tergantung dana disetujui oleh atasan atau tidak.

12. Menurut Bapak, sepenting apa keberadaan humas di Pemda DIY?

Ha.. Penting banget. Itu juru bicara, kayak jamannya Pak Harto, Harmoko itu. Maksudnya penting banget, karena nanti kalau Pak Gubernur mau ngapa-ngapa, masyarakat gak ngerti. Nanti sosialisasi UU Keistimewaan ini, masyarakat bisa gak ngerti kalau tidak ada humas. Terus Pak Gubernur kemarin barusan mencanangkan bahwa di DIY, dari Among Tani ke Dagang Layar. Artinya, tidak hanya masyarakat petani, tapi masyarakat nelayan dibudidayakan. Nanti pantai selatan dari Bantul sampai Gunung Kidul, itu mau dibuka pendaratan ikan, jadi nanti dikembangkan di pantai selatan. Nanti jalan Daendels itu jadi, itu ekonomi nanti arahnya ke selatan itu, nah nanti disosialisasikan oleh humas. Kalau gak gitu, nanti masyarakat gak ngerti.

13. Jadi memang humas sebagai jembatan ya, Pak?

Iya, sebagai jembatan dari pimpinan ke masyarakat. Dari Pak Gubernur, Wagub, dan Kepala-kepala Daerah kepada masyarakat dan kepada *stakeholder-stakeholder* swasta. Kayak besok ini, mau pembukaan lahan di bandara, Kulon Progo kita yang sosialisasi.

Wawancara dengan Pak Budi (Kasubbag Publikasi, Dokumentasi, dan Media Massa Pemerintah DIY) – Rabu, 4 September 2013

14. Menurut Bapak, pengertian humas di Pemda DIY ini seperti apa?

Secara singkat, humas itu pengertiannya merupakan suatu seni, seni untuk menciptakan pengertian pada publik sehingga apa yang disampaikan pada publik itu mendapatkan suatu kepercayaan publik terhadap sesuatu yang dikerjakan baik yang dilaksanakan oleh individu ataupun instansi. Kalau

memang pengertiannya itu sangat luas kalau humas itu. Maksudnya diciptakan humas itu, untuk menarik perhatian publik supaya publik itu ada ketertarikan atas suatu peristiwa, informasi, dan semacam itu. Kalau di pemerintah itu, kegiatan-kegiatan tersebut diberitakan kepada publik secara benar dan utuh. Artinya secara terbuka, informasi tidak dipenggal-penggal.

15. Apa saja yang menjadi tugas humas di Pemda DIY?

Kalau di Pemda DIY ini sudah diatur, tugas-tugas kehumasan itu sudah ada Perda-nya, menurut kelembagaan kalau di Pemda DIY ini. Perda-nya itu No. 5 tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah. Di dalam Perda itu sudah ada pasal atau bab-bab yang menjelaskan peran suatu instansi dan dalam Perda tersebut ditegaskan dalam keputusan Gubernur No 37 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kehumasan. Secara umum, humas bertugas penyusunan program bagian humas, koordinasi penyelenggaraan kegiatan kehumasan, kedua penyelenggaraan, pendokumentasian, kebijakan, dan kegiatan pemerintah daerah, kemudian penyelenggaraan, publikasi, dan kebijakan dan hubungan antar lembaga dan pelaksanaan evaluasi dan penulisan laporan. Dalam pelaksanaan tugasnya, di bagian humas sendiri dibantu oleh dua Subbag, yaitu Subbag PDM (Publikasi, Dokumentasi dan Media Massa), Subbag HAL (Hubungan Antar Lembaga). Jadi PDM lebih ke media, karena kita sesuai dengan tupoksi mempunyai kemitraan dengan wartawan, dengan media cetak maupun elektronik, sehingga kita harus betul-betul menciptakan suasana yang nyaman, enak, kemudian tidak menimbulkan masalah, sehingga berita dan informasi yang disampaikan kepada publik itu, adanya yang seimbang. Tidak berat sebelah. Kalau memang ada yang kurang pas, ya dikritik, kalau memang ada kelebihan ya disampaikan itu suatu keberhasilan dan sebagainya. Itu salah satu masalah kemitraan. Kemudian pelaksanaan produksi paket informasi ini maksudnya kita membuat suatu paket informasi masalah potensi-potensi atau kegiatan-kegiatan yang ditengarai oleh pemerintah daerah. Brosur, leaflet, spanduk, baliho juga dibuat dari sini. Kita juga mempunyai kegiatan semacam sarasehan di radio, materinya juga

kebijakan Pemda, kebijakan yang mempunyai tujuan informasi yang betul-betul dibutuhkan dengan masyarakat apalagi berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

16. Menurut Bapak, ketika Pemda mendapat isu yang berdampak negatif bagi Pemda. Sejauh mana peran humas dalam penyelesaiannya?

Misalnya suatu media memberitakan hal-hal yang tidak benar, kita tanya balik ke redaksinya, kemudian kita informasikan. Nah, sejauh ini kan kami melaksanakan tidak menggunakan surat secara resmi, cukup *by phone* saja. Karena apa? Karena ini sudah terjalin baik antara media dengan humas, sehingga tidak pakai surat secara formil pun sudah ditanggapi dengan baik dengan media yang bersangkutan. Kita tetap melakukan komunikasi untuk menanggapi hal-hal yang tidak benar.

17. Jadi, walaupun pemberitaan itu tidak memberitakan humas secara khusus, tapi lebih kepada Pemda DIY secara umum, bagian yang terkait akan isu tersebut akan diajakan turut serta dalam penyelesaiannya?

Oiya jelas.. Jadi kita konfirmasi dulu, misalnya Dinas Pertanian. “Oya, Dinas Pertanian di lahan sana kok di makan ulat padinya, gimana ini?”, padahal setelah dicek itu tidak ada. Nah, kita tanya dulu ke instansi terkait, baru setelah dicek tidak ada, mediana diberitau bahwa beritanya keliru. Biasanya paginya akan ada permintaan maaf atas kekeliruan, cukup itu aja.

18. Kalau yang dilakukan bagian humas untuk mengetahui informasi seputar kehumasan di luar organisasi?

Kita melaksanakan hunting. Studi banding, kita secara khusus masih belum kita programkan, tapi kita studi bandingnya bersama-sama dengan teman-teman media. Jadi dengan wartawan, namanya *press tour*. Nah, disitu kita ngajak wartawan paling tidak yang 20-30 orang dengan tujuan ke kota Malang kemudian studi bandingnya secara implisit kita ngomong-ngomongnya tentang kehumasan yang pertama, yang kedua ngomong-ngomong mengenai

pembinaan media yang ada di daerah itu dan kita juga meliput, pergi-pergi ke tempat UKM, wisata yang mana tempat-tempat itu kalau memang bermanfaat bagi masyarakat DIY bisa diupload ke portal Jogja untuk dapat diketahui masyarakat DIY. Itulah studi banding yang dilakukan oleh humas tapi bentuknya *press tour*.

19. Semisal ada acara publik, humas juga diundang turut serta atau bagaimana?

Ya... Jadi gini, secara tupoksi kita itu hanya melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemerintah daerah. Kalau ada masyarakat umum yang menyelenggarakan kegiatan atau suatu event tapi melibatkan peran kepala daerah atau Gubernur dan jajarannya, kita ikut. Tapi lihat kegiatannya juga, kalau hanya lomba mancing ya gausah. Tapi kalau peran itu misalnya ada semacam pengentasan kemiskinan, misalnya dilakukan oleh lembaga swasta ya misalnya turut menyumbang mengentaskan kemiskinan atau menciptakan suatu kegiatan di industry kecil misalnya, atau kita ikut apalagi menyertakan jajaran pejabatnya. Tapi kalau cuma dilaksanakan oleh lembaga swasta sendiri, kita tidak ikut nanti dikira ikut ke ranah itu. Kita tidak ada kewenangan untuk masuk.

20. Jadi ketika ada *event* publik yang menyertakan jajaran pejabat pemerintah dan juga melihat acaranya, humas juga ikut serta ya Pak?

Iya, ikut. Karena apa? Itu memang tugas, tugasnya kita kan itu meliput kegiatannya pemerintah, pemerintah itu kan yang memimpin Gubernur di level propinsi, kalau di kabupaten ya Bupati dan kotamadya walikota. Semua sama menurut saya.

21. Kalau untuk memfasilitasi komunikasi dengan publik internal dan eksternal?

Kalau internal, kita memfasilitasinya dengan yang sesuai diberikan oleh pemerintah tentunya dan kita juga mengadakan suatu pembinaan, ramah tamah, itu mungkin juga dilakukan. Kalau eksternal misalnya dengan mitra kerja wartawan, kita memfasilitasi tempat ruang *press room* dengan peralatan

seadanya semampunya pemerintah dan ke depan perlu ada peningkatan kemudian untuk masyarakat umum, biasanya masyarakat datang ke sini untuk mencari informasi, kita memfasilitasi, kita layani. Kalau informasinya masalah berita bisa membuka di *facebook*, portal Jogja, websitenya pemda.

22. Cukup banyak produk kehumasan yang dihasilkan pemda, *release* hampir setiap hari ada. Untuk majalah, buletin, waktu terbitnya ?

Majalah ada dua produk, yang pertama edisi bulanan berisi kegiatan-kegiatan pemerintah setiap bulannya dikumpulkan. Yang kedua yang setahun sekali, edisi khusus. Edisi khusus ini hanya mengangkat satu topik saja.

23. Kalau menurut Bapak pribadi, seberapa penting keberadaan humas di Pemda DIY?

Keberadaan humas di Pemda sangat penting. Keberhasilan suatu Pemda, pembangunan suatu Pemda di mana pun ujung tombak pertamanya adalah humas. Karena apa? Sebelum Pemda itu melaksanakan kegiatan, humas itu sudah memberikan semacam pemberitaan atau memberitakan kegiatan yang sudah selesai, kan gitu. Jadi dari awal sampai akhir, humas itu perannya ada. Makanya, sangat-sangat penting, sebagai ujung tombaknya. Sangat penting sekali dan itu kalau tidak dipahami oleh semua pihak maka daerah itu tidak akan dikenal oleh publik, apalagi yang mempunyai potensi wisata sangat potensial sangat bagus, kalau tidak humasnya ikut *cawe-cawe* masyarakat luar kan tidak mengerti, kemudian daerah kan kekurangan *income*. Tapi kalau peran humas itu ikut di dalamnya secara optimal, nah *Insyallah* Pemda itu akan eksis nantinya.

Wawancara dengan Pak Iswanto (Kabag Humas Pemda DIY) – 5 September 2013

24. Menurut Bapak, humas di Pemda ini diartikan seperti apa ya Pak?

Humas merupakan ketugasan fungsi, ketugasan kami adalah sebagai satu bagian merupakan lembaga atau institusi yang membantu Bapak Gubernur di dalam menyelenggarakan atau menyampaikan informasi kepada publik dan humas ini bekerja sama dengan dengan *mass media* yang ada di DIY. Kemudian humas itu kan bagian dari Biro Umum, Humas, dan Protokol. Bagian humas sendiri terdiri dari 2 Subbag. Masing-masing Subbag, punya tupoksi masing. Yang pertama Subbag Publikasi, Dokumentasi dan Media yaitu tugasnya yang pertama, merumuskan dan membuat agenda yang sifatnya peliputan, peliputan itu dengan video kemudian gambar atau foto dan juga lewat *mass media* lewat koran, buletin, dan televisi. Kemudian yang satunya, Subbag Hubungan Antar Lembaga, tupoksinya antaran lain, penyusunan sambutan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, dan Asisten Sekda. Sehingga tugas pokok Subbag HAL membuat sambutan-sambutan, mengadakan sarasehan dan juga workshop dengan melibatkan beberapa instansi di DIY.

25. Jadi, itu bisa dikatakan sebagai cara untuk memfasilitasi komunikasi internal di Pemda DIY ya Pak?

Ya, juga antar lembaga yang ada di DIY. Kemudian di dua Subbag tersebut yang mengoordinir adalah Kabag sesuai dengan tupoksi Bagian Humas.

26. Semisal ya, Pak. Pemda mendapatkan suatu isu yang cenderung berdampak negatif untuk Pemda. Sejauh mana peran humas dalam hal penyelesaiannya?

Humas, harus mencari data dulu. Kita cari, yang jelas akurat atau tidak data itu. Artinya kita *cross check* ke lapangan. Kemudian kita mengadakan koordinasi dengan bagian Subbag dan bagian terkait yang lain.

27. Jadi memang ketika, terdapat berita yang simpang siur, humas yang akan akan langsung *menghandle* ya Pak?

Iya, betul sekali. Jadi kita itu ada wadahnya untuk menyampaikan berita, lewat sarasehan itu. Entah itu dengan pelawak, mengadakan pengajian, acara kesenian, ketoprak, campur sari, di sela-sela itu bisa disisipkan penerangan

yang sifatnya penjelasan kepada masyarakat, bahwa katakanlah kasus ini bukanlah seperti ini. Jadi sebagai alat, alat memberikan penerangan kepada masyarakat, yang meresahkan jika ada isu-isu yang tidak sesuai dengan sebenarnya. Katakanlah, adanya misalkan Pemilukada Kabupaten Kota dengan *money politic* itu kita luruskan melalui media massa, lewat saraseha itu.

28. Kalau yang dilakukan Bagian Humas sendiri untuk mengetahui informasi terkini perihal kehumasan yang ada di luar Pemda DIY?

Studi banding, ada. Tahun 2013 kemarin kita mengadakan studi banding ke Jawa Timur, ke Malang. Di sana apa yang kita lihat, yang menonjol katakanlah kemarin itu soal pengolahan sampah, kita humas dan para wartawan kita ajak ke sana untuk melihat dari dekat bagaimana pengolahan sampah di Malang dan nanti hasil dari studi banding itu kita sampaikan ke daerah DIY. Kemudian tata kerja humas di sana juga kita lihat, apa yang ada di sana di sini tidak ada, yang ada di sini di sana tidak ada kita saling bertukar informasi.

29. Untuk memfasilitasi komunikasi dengan publik eksternal?

Sebenarnya kita kan ada anggaran khusus kan ya untuk menyelenggarakan itu, jadi seperti sebelum puasa kemarin seperti sarasehan kehumasan, kemudian di sana kita mengundang masyarakat setempat, kita mengundang pelawak, kita mengundang penyanyi, kita mengundang kebetulan Ustad yang memberikan penerangan itu, kemudian kita memberikan bantuan sosial kepada masyarakat untuk sembako. Ada imbal balik, dia datang kita beri bantuan. Di samping ia menerima penerangan, penjelasan, dan menerima hiburan, kita juga beri bantuan sosial.

30. Jadi, keikutsertaan humas di *event publik* memang sudah sering terjalin ya Pak?

Iya.. iya.. Apalagi kalau dengan Pemda kan melekat kan humas itu, tiap kegiatan harus diliput oleh humas.

31. Produk-produk kehumasan apa saja yang dihasilkan oleh Bagian Humas?

Yang pertama adalah berita, agenda kegiatan Pemda DIY. Semua agenda dan kegiatan semua beritanya kita ambil kita kirim ke TVRI, ke koran, ke radio, kemudian itu yang bentuk penerangan ya. Kemudian yang bentuk tulisan ya buletin, kita setiap bulan kita membikin buletin Jogja Wara, setiap bulan. Setiap tahun ada edisi khusus, setahun sekali dan materinya ganti-ganti. Dikirim ke instansi-instansi sampai ke desa. Kemudian buku kerja, buku kerja yang diberikan kepada pejabat-pejabat.

32. Humas melekat dengan media ya, Pak. Otomatis dekat juga dengan wartawan.

Lalu bagaimana menjaga hubungan dengan wartawan?

Yang pertama kita melakukan jumpa pers, itu adalah salah satu cara, ketika ada informasi kita sampaikan kepada teman-teman melalui jumpa pers kemudian kita dengan instansi lain ada agenda apa, kita ajak jumpa pers dengan wartawan. Jadi selalu ada komunikasi kegiatan. Misal Biro Tata Pemerintahan ada agenda mengenai E-KTP, saya mengundang dari Biro Tata Pemerintahan, kita undang apara wartawan, kita ajak omong-omong, ada kendala apa, masalah apa. Seperti tadi ke Malang, itu adalah suatu cara juga untuk dekat dengan wartawan. Kita ajak satu bis rame-rame. Kemarin Syawalan kita undang semua, terus kalau ada agenda seremonial kita rangkul, kita ajak bersama-sama, kita tempatkan sebagaimana mestinya. Saling mengisi. Kalau kita memberikan penghormatan kepada teman-teman wartawan, ya kita juga mestinya kita juga senang nanti.

33. Itu wartawan cetak saja, atau wartawan media elektronik juga turut serta?

Ya, kita ajak juga. Radio, RRI, radio swasta. Kemudian TV, TVRI, Jogja TV, kemudian, TV Swasta Jakarta yang mungkin ada kontributornya kita undang. Semua kita undang.

34. Kalau Bakohumas kan khusus memang untuk humas pemerintahan. Kalau organisasi kehumasan yang di luar itu, seperti Kapurel?

Emm.. Enggak terlalu ya. Ya, kalau Bakohumas kan itu untuk humas pemerintah, jadi kita antar lembaga. Kalau dengan swasta kita hanya sebatas lewat koran saja.

35. Kalau menurut Bapak, seberapa penting keberadaan humas di Pemda DIY?

Penting sekali, humas itu penting sekali karena humas itu merupakan corong, humas itu kan sebagai corongnya pemda. Sehingga apa yang ada di Pemda itu perlu disampaikan kepada masyarakat. Tentu saja yang disampaikan yang sifatnya umum, kalau yang katakanlah rahasia ya tidak perlu ditampilkan, yang harus diketahui masyarakat pasti kita sampaikan.